Pemerintah Kabupaten Paser

LKjIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2025



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat, Kasih sayang dan IjinNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas dan fungsi, diberi amanah oleh pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mendukung kemajuan pembangunan Kabupaten Paser bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tersebut berupa laporan kinerja yang sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2014.

Pelaporan kinerja ini bertujuan memberikan informasi yang terukur kepada pemberi manfat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi bahan evalusi kinerja bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik yang menyangkut substansi isi maupun penulisannya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari semua pihak, guna perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami untuk masa-masa yang akan datang.

Tanah Grogot, 05 Februari 2026

Kepala Badan,

Nonding ,S.Sos,MM
Pembina Utama Muda/VI c
NIP. 197106071997031007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser selama tahun 2025. Capaian Kinerja *(performance results)* tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja *(Performance Agreement)* tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran, dengan kategori capaian ***baik***. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang 1
B Maksud dan Tujuan..... 2
C Permasalahan dan Isu Strategis 4
D Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan..... 5
E Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 7
F Sarana dan Prasarana…….. 10
G Sistematika Laporan ……. 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11
A Perencanaan Strategis Tahun 2025 …….. 11
B Perjanjian Kinerja Tahun 2025 14
C Instrumen Pendukung 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22
A Capaian Kinerja Tahun 2025 22
B Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 33
C Permasalahan …….. .. 34
D. Analisis Kegagalan dan Keberhasilan …… 34

BAB IV PENUTUP 39
A Kesimpulan 39
B Perbaikan Ke depan 40
C Sumber Data Kinerja 41

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
2. SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
3. SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
4. SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
5. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA
6. FORMULIR E 81
7. PENGHARGAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif perencanaan pembangunan diungkapkan bahwa Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kepemerintahan, sehingga diharapkan adanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai salah satu upaya pemenuhan tata pemerintahan yang akuntabel maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengisyaratkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat esselon II, setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerja kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga diharapkan berperan sebagai

alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Krja Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah. Selain itu Laporan Kinerja juga merupakan upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun anggaran

2025. Tujuan dari pada penyusunan laporan kinerja ini antara lain adalah :

a) Mempertanggungjawabkan kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025;
b) Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025.

C. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada Bab ini, akan dijelaskan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

- Masih rendahnya wawasan kebangsaan dan pengamalan nilai Pancasila dan masih rendahnya nilai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk permasalahan dan isu strategis ini merupakan tugas dan fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dan masih rendahnya pemberdayaan ormas. Untuk permasalahan dan isu strategis ini merupakan tugas dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- Masih belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban dan kewaspadaan masyarakat. Untuk permasalahan dan isu strategis ini merupakan tugas dan fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Berdasarkan gambaran pelayanan di atas, maka permasalahan-permasalahan pelayanan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dibidang kesatuan bangsa dan kesadaran politik	1. Masih rendahnya wawasan kebangsaan dan idiologi Negara serta pengamalan nilai Pancasila.	1. Heterogennya masyarakat di Kabupaten Paser sehingga rentan terjadi gesekan sosial di masyarakat baik yang disebabkan olah SARA, Persoalan Ekonomi ataupun persoalan lainnya.
	2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dan masih rendahnya pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan	1. Belum terbentuknya tim pemantauan perkembangan politik didaerah dalam menciptakan stabilitas politik didaerah secara

		berkesinambungan 2. Kurangnya Pembinaan kelembagaan keormasan terhadap aturan yang berlaku.
	3. Masih belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban dan kewaspadaan masyarakat	1. Belum maksimalnya fungsi kewaspadaan dini di daerah.

D. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser. Badan Kesatuan bangsa dan Politik adalah unsur Penunjang Urusan Pemerintah Umum Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

1. Kedudukan

Badan Kesatuan bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas

Badan Badan Kesatuan bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan bangsa dan Politik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :

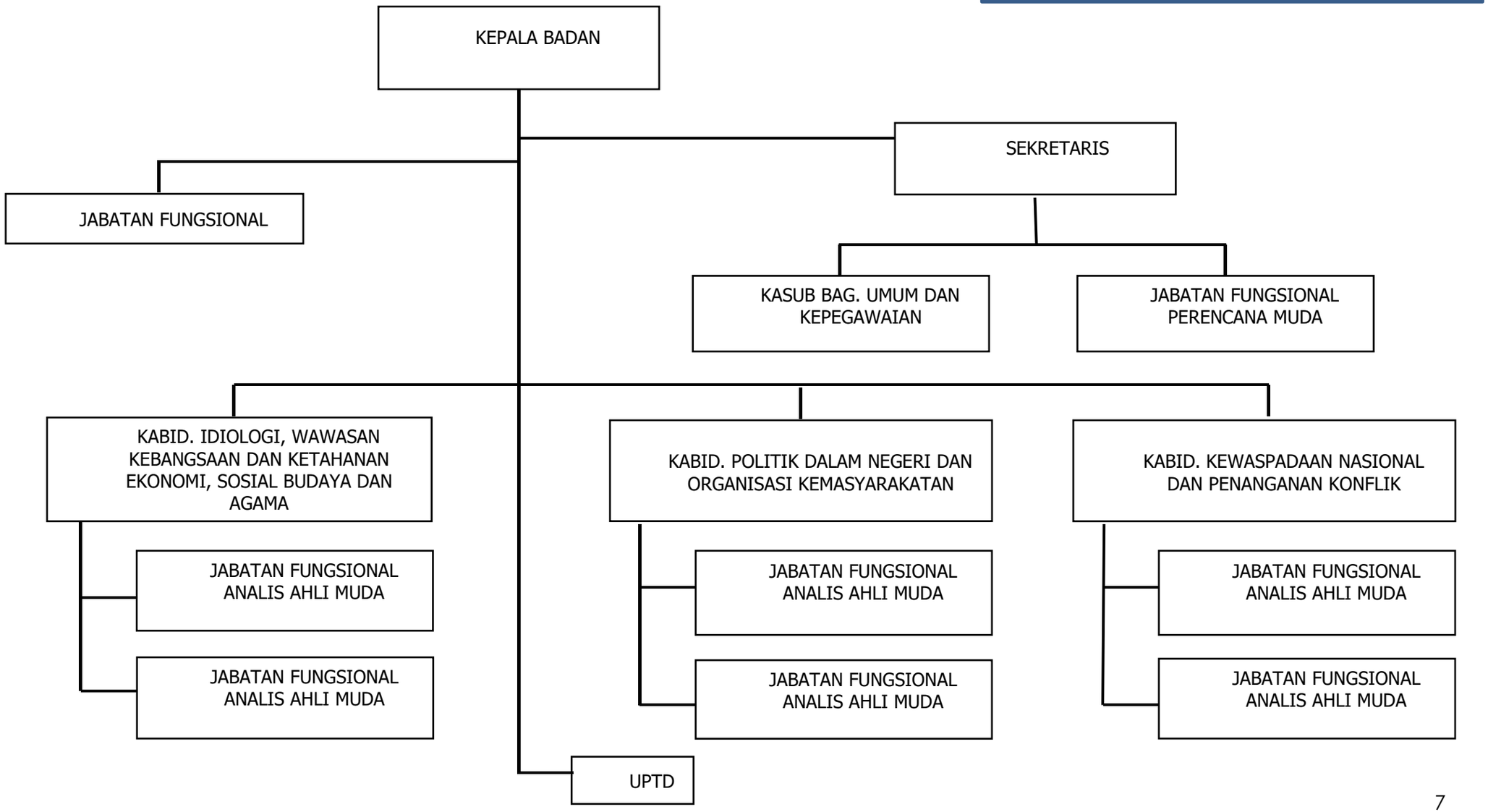
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

E. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ditetapkan dengan bagan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PASER

Lampiran Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser



Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai di lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2025 sebanyak 37 orang, dengan perincian :

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	4
2	S1	23
3	D III	1
4	SLTA	8
5	SLTP	1
	Total	37

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1 di atas, tingkat pendidikan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cukup memadai. Tingkat pendidikan aparatur yang paling banyak adalah berpendidikan sarjana atau Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 23 orang (62.16 %). Selanjutnya kedua terbanyak adalah tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 8 Orang (21.62 %). Sedangkan ketiga terbanyak adalah berpendidikan Pasca Sarjana atau Strata 2 (S2), yaitu sebanyak 4 orang (10.81 %). Dan berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 Orang (2.70 %). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Pegawai yang latar belakang Pendidikan Strata 3, Diploma 4, dan Sekolah Dasar.

Dari jumlah pegawai sebanyak 37 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan.

Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	22
2	Perempuan	15
	Total	37

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	1
4	JF	5
5	Pelaksana	26
	Total	37

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Diklat PIM TK II	1
2	Diklat PIM TK III	2
3	Diklat PIM TK IV	3
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	1
5	Pelatihan Kepemipinan Pengawas (PKP)	1
	Total	8

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

F. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Aset Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tgl	No				
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2465	4/19/ 1988	Jalan Sultan Ibrahim Khalilud din Tanah Grogot	Hak Pakai	-	-	Pernah di gunakan sebagai Kantor Badan Kesbangpol	Pengadaan APBD	394.400. 000	

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser,2

Tabel Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Rp)
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jalan. Sultan Ibrahim Khaliluddin Tanah Grogot	224.00		Hibah	832.965.500
2.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik		Jalan negara kilo 6 tana paser	199.50		Pengadaan APBD	1.838.926.972
3.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain-lain	Baik		Jalan Kusuma Bangsa KM. 5	81.00		Pengadaan APBD	11.500.000

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

Tabel Keadaan Sarana dan Prasarana

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1.	Lemari Besi	25	Baik	
2.	Meja kerja	62	Baik	
3.	Kursi Kerja	57	Baik	
4.	Meja Rapat	8	Baik	
5.	Kursi Rapat	73	Baik	
6.	Sofa	3	Baik	
7.	Kendaraan Dinas	3	Baik	
8.	Sepeda Motor	4	Baik	
9.	Personal Computer (PC)	31	Baik	
10.	Laptop	15	Baik	
11.	Tablet	2	Baik	
12	Printer	31	Baik	
13.	Portabel Scanning	2	Baik	
14.	Televisi	3	Baik	
15.	Kamera Digital	1	Baik	
16.	Mesin Penghancur Kertas	1	Baik	
17.	Speaker Sound	1	Baik	
18.	Proyektor	1	Baik	
19.	Filing Kabinet	6	Baik	

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2025

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Kata Pengantar

bagian yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi dan berisi hal-hal penting yang ingin disampaikan mengenai akuntabilitas kinerja organisasi

Ikhtisar Eksekutif

menyajikan secara ringkas tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja berdasarkan pengukuran dan analisis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2025

Bab I – Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, serta kedudukan, tugas fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser .

Bab II – Perencanaan Kinerja

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser Tahun 2025 meliputi RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser Tahun 2022 - 2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025.

Bab IV – Penutup

menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2022–2026, sehubungan dengan tugas dan fungs Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021 -2026.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser, penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Paser mengacu pada RPJMD serta mempunyai kausalitas dengan RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-4 dan tujuan ke-1 dan 2 yaitu :

MISI Ke - 2	TUJUAN Ke – 1 dan Ke-2
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas 2. Mewujudkan Masyarakat yang Memahami dan Menjaga Kesatuan bangsa dan Politik

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam jangka waktu sampai dengan 2026 (tahun ke -5 pelaksanaan Renstra) yang perumusannya didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan berdasarkan visi, misi tujuan dan sasaran Kepala Daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagaimana tertuang pada Renstra ditetapkan 2 Tujuan dengan 6 sasaran. Berikut disajikan hubungan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik :

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			70 %	70 %	73 %	75 %	80 %	85 %	85%
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	CC	B	B	BB	A	A	A
Mewujudkan Masyarakat yang memahami dan Menjaga Kesatuan dan Kesatan bangsa dan Politik	Mewujudkan Lingkungan Daerah yagng Kondusif			76%	76 %	78 %	80 %	85 %	90 %	90%
		Meningkatkan Pemahaman Idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan.	Persentase Peningkatan Kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	0%	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Mewujudkan masyarakat Kabupaten paser yang responsif danbertanggung jawab dalam Proses dan partisipasi Politik yang demokratis	Partisipasi Penyelenggaraan Pemilu	75%	75 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80%
		Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Presentase Organisasimasyarakat yang difasilitasi	75%	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100%
		Mewujudkan Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya dan Agama	Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya dan Agama	75%	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100%
		Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga Kondisifitas yang tertib dan Aman	Terjuwudnyastabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Table 2 Matriks hubungan tujuan, sasaran, kebijakan dan program Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2022 - 2026

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat daerah yang Optimal / Responsif dan Tangkas

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Membina dan meningkatkan Peran serta Aparatur sehingga mencapai pola kerja yang baik menuju Good governance	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Tujuan 2 : Mewujudkan masyarakat yang memahami dan menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1. Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Program penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
2. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten paser yang responsif dan Bertanggung Jawab dalam proses dan Partisipasi Politik yang demokratis.	Membina dan Meningkatkan Pemahaman Politik masyarakat sehinggan meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pemilu	Program Peningkatan Peran partai Poltik dan lembaga pendidikan Politik melalui Pendidikan Politikdan pengembangan Etika serta Budaya Politik
3. Mewujudkan Pembinaan dan pemberdayaan Ormas	Membina dan Memberdayakan Ormas	Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan
4. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1. Penguatan Kesadaran Apara tur negara dan masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Peningkatan Peran Tokoh Masyarakat . Tokoh Agma. Tokoh Pemuda . Tokoh perempuan . Tokoh Adat dalam penanganan Pencegahan dan penanggulangan Narkoba.	Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial ,Budaya dan Agama
5. Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga Kondusifitas yang tertib dan Aman	1. Peningkatandeteksi Dini dan Cegah dini terhadap Ancaman Stabilitas Daerah. 2. Peningkatan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitasdan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 yang telah disusun, maka Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser telah menyusun rincian Program dan Kegiatan Pada Renja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan
1	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
		Pemelihaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah
2	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan**	Perumuusan Kebijakaan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasiladan karakter kebangsaan
3	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik . Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik , Pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik.
4.	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan**	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan
5.	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budayadan Agama.
6.	**Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganam Konflik Sosial**	Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya yang dijabarkan per tahun. Penetapan indikator kinerja sasaran strategis tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis-dapat dicapai namun menantang), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Countinously improved (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi oganisasi). Indikator Kinerja tersebut seluruhnya

bersifat outcome yang sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal. Demikian pula dengan target yang ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan seluruh Bidang pengampu melalui Rapat.

Dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategisnya. Penetapan IKU yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2022-2026. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser yang akan digunakan dengan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2025. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan kesatuan bangsa dan Politik Tahun 2025 turunan dari IKU yang merupakan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III sampai IV tersaji dalam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari laporan kinerja ini.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya.

Adapun formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama secara terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 4 Indikator Kinerja Utama BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK Kabupaten Paser

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	Hasil Evaluasi dari Inspektorat **Definisi Operasional :** Nilai Sakip merupakan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal		SEKRETARIAT
2	Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan kesada - ran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	Jumlah terlaksananya peningkatan kesadaran masyarakat ttg Ideologi Pancasila / Jumlah Sosialiasi tahun (n) x 100 **Definisi Operasional :** Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila perlu dilakukan guna peningkatan nilai moral warga Negara Indonesia. Upaya menjaga dan menguatkan Nilai - Nilai Pancasila dimasa sekarang dimasyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal yaitu pendekatan budaya, internalisasi disemua level Pendidikan dan Penegakan hukum terhadap hal - hal yang tidak sejalan dengan nilai – nilai pancasila		BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang Responsif dan Bertanggung Jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis	Fasilitasi Penyelengaraan Pemilu	Jumlah yang Mengikuti Partisipasi politik / Jumlah partisipasi Politik X 100% **Definisi Operasional :** Tujuan Penyelenggaran Pemilu adalah melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga Negara. Untuk menjamin Penyelenggaran Pemilu dapat berjalan dengan tertib dan aman diperlukan Upaya / Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu.		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
4	Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas	Persentase Jumlah Fasilitasi Ormas	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Masih Aktif / Jumlah Organsisasi Kemasyarakatan Yang terdaftar X 100% **Definisi Operasional :** Tumbuhnya Organisasi Kemasyarakatan secara masif dengan beragam platfrom yang sering kali menimbulkan gesekan - gesekan dimasyarakat mengharuskan pemerintah untuk mengawaL kemerdekaan berserikat / berkumpul tersebut . Tantangan terbesar dalam mengelola Organisasi Masyarakat adalah mengarahkan Keberadannya agar bermanfaat bagi masyarakat , bangsa dan Negara.		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			gesekan dimasyarakat mengharuskan pemerintah untuk mengawaL kemerdekaan berserikat / berkumpul tersebut . Tantangan terbesar dalam mengelola Organisasi Masyarakat adalah mengarahkan Keberadannya agar bermanfaat bagi masyarakat , bangsa dan Negara.		
5	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah terlaksananya peningkatan wawasan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama tahun (n) / Jumlah sosialisasi tahun (n) X 100% **Definisi Operasional :** Dalam rangka mewujudkan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pemerintah perlu menetapkan Kebijakan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya guna menghindari Permasalahan yang timbul dimasyarakat. Salah satu Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan .		BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6	Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga Kondusifitas yang tertib dan Aman	Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang terselsaikan}}{\text{Jumlah Konflik Sosial yang ada}}$ X 100% **Definisi Operasional :** Untuk mewujudkan Stabiilitas Keamanan dan Ketertiban dikabupaten Paser perlu dilakukan Upaya Pencegahan antara lain melakukan Pembinaan antar suku dan intra suku umat beragama, ras, dan golongan lainnya serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan sebelum, saat dan pasca konflik guna mewujudkan stabilitas keamanan Daerah		BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Badan Kesatuan bangsa Kabupaten Paser mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar **Rp 16.678.514.625** yang digunakan untuk melaksanakan 11 kegiatan yang terangkum dalam 6 program sebagai berikut:

NO.	*PROGRAM/KEGIATAN*	*ANGGARAN (Rp)*
A.	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**7.272.291.514,00**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	194.450.422,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.464.302.113,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.073.328,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00
5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.999.185,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.466.466,00
B	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**3.434.660.433,00**
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideoligi Pancasila dan karakter Kebangsaan	3.434.660.433,00
C	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**2.341.078.759,00**
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik ,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan.	2.341.078.759,00
D	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**356.455.379,00**
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	356.455.379,00
E	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA**	**1.185.419.812,00**
1.	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.	1.185.419.812,00
F	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**2.088.608.728,00**
1.	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial .	2.088.608.728,00
	TOTAL	**16.678.514.625,00**

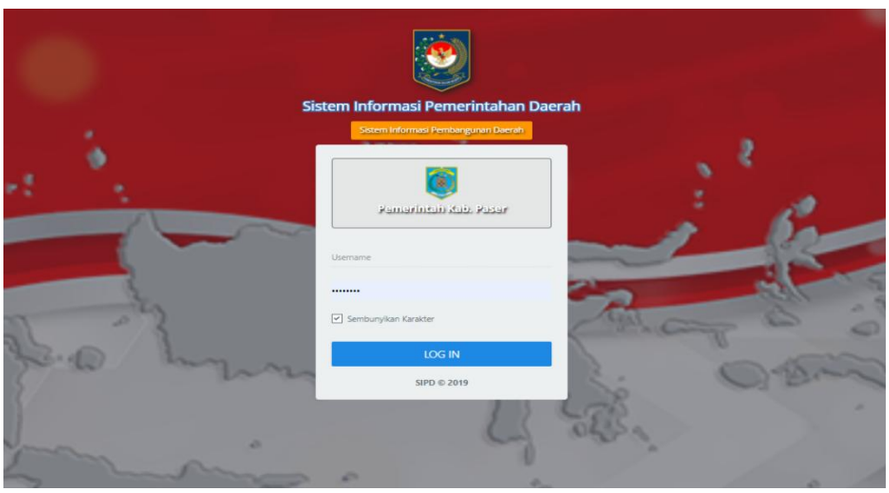
Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2.

Jumlah anggaran tersebut selanjutkan digunakan untuk mendukung terwujudnya 6 sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2025.

C. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Paser. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi,. sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan,salah satu Aplikasi yangselalu digunakan adaiah Aplikasi Perencanaan yang dipergunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (**SIPD**) **Kemendagri** dengan alamat web address https://pasirkab.sipd.kemendagri.go.id/ yang dimulai akhir Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Paser mempersiapkan implementasi SIPD Keuda sehingga sistem perencanaan bisa terintegrasi dengan sistem penganggaran.



Gambar 1 Aplikasi SIPD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{\text{Target}} \quad x100\%$$

a. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target}{Realisasi} x100\%$$

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2025 yang ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2025.

Penilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan

sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser, pencapaian IKU Badan Kesatuan bangsa dan Poltik Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Pengukuran IKU Badan Kesbangpol Kab. Paser Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA		TARGET TAHUN 2025	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya Pengelola Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Sakip dan AKIP	Cukup Jelas	X 100	A	BB (76.60)	95,75
Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	Jumlah terlaksananya Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila dibagi Jumlah Sosialisasi Tahun (n)	X 100	100%	100 %	100
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Yang Responsif dan Bertanggung Jawab dalam Proses dan Partisipasi Politik yang Demokratis	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah yang mengikuti Partisipasi Politik dibagi Jumlah Partisipasi Politik	X 100	80%	90,12%	90,12
Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas	Persentase Jumlah Fasilitasi Ormas	Jumlah Ormas yg masih aktif dibagi Jumah Ormas yang terdaftar	X 100	100%	127,64%	127,65
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya	Persentase Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Jumlah terlaksananya Peningkatan Wawasan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Agama Tahun n dibagi Jumlah Sosialisasi tahun n	X 100	100%	21,34 %	21,340
Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga Kondisifitas yang tertib dan Aman	Persentase Kasus Konflik yang terselesaikan	Jumlah Konflik Sosial yang terselesaikan dibagi Jumlah Konflik yang ada	x 100	100 %	95,15 %	95,15
RATA-RATA CAPAIAN						**88,33**

A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 sebanyak 6 indikator dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Memuaskan (capaian diatas 90%-100%) sebanyak 2 indikator
- Tinggi (capaian diatas 76%-90%) sebanyak 3 indikator
- Sangat Rendah (capaian ≤ 50% sebanyak 1 indikator

Dari pengukuran IKU diatas, menunjukkan kinerja pencapaian sasaran strategis memenuhi target dengan kriteria sangat berhasil. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis dibawah ini :

Tabel 6 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasiyang Akuntabel

Perbandingan Nilai Sakip Trget Nasional atau Daerah lain

yang Sebanding dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Nama Daerah		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kesbangpol Kota Banjarmasin	A (80 %)	BB (75,85)	
2	Kesbangpol Provinsi Banjarmasin	A (80 %)	B (68,95)	
3	Kesbangpol Kab. Banjarbaru	A (80 %)	A (83,01)	
4	Kesbangpol Kab.Hulu Sungai Utara	A (85 %)	A (85,60)	
5	Kesbangpol Kabupaten Paser	BB (80%)	BB (76,60)	95,75 %

Penjelasan :

Perbandingan Nilai Sakip atara Target Nasional /Daerah lain yang sebanding untuk Tahun 2025 dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Paser adalah:

1. Dari Hasil Perbandingan Kinerja dan Hasil Capaian Kinerja untuk Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser untuk Tahun 2025 hasil capaian kinerja Sakip telah melampaui Target yang sudah ditentukan.

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Politik Provinsi Kalimatan Selatan (Kesbangpol Provinsi Banjarmasin, Kesbangpol Kota Banjarmasin, Kesbangpol Kabupaten Banjarbaru, dan Kesbangpol Hulu Sungai Utara) yang tipe Struktur Organisasinya adalah A sesuai dengan Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan maka Target Nilai SAKIP harus mencapai Nilai A, tetapi Hanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar baru saja yang hasil Capaian Kinerja nya sesuai dengan Target yang sudah Ditentukan, sementara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin dan Provinsi Capaian Kinerja masih belum mencapai Target.

3. Informasi Dari Kasubag Perencanaan dan Program Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin pada tahun 2024 sudah memperoleh nilai A (81,25) tetapi karena ketidaktersedian data/tidak membuat laporan kinerja oleh para bidang membuat nilai SAKIP tahun 2025 merosot menjadi nilai BB (75,95). Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga banyak target dan para bidang tidak mencapai target kinerja .

4. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, target nilai SAKIP adalah A tetapi hasil capaian kinerja SAKIP hanya memperoleh nilai B (68,95), Hal ini disebabkan karena masih banyak data – data yang belum selesai dibuat dan dilampirkan dalam pengisian di aplikasi SAKIP.
5. Dari Hasil Perbandingan Kinerja dan Hasil Capaian Kinerja untuk Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu sungai Utara untuk tahun 2025 hasil capaian kinerja SAKIP telah melampaui target yang sudah ditentukan.
6. Sesuai dengan hasil perbandingan nilai SAKIP diatas, disarankan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dapat memperbaiki dan melengkapi data yang kurang dengan menyertakan data dari seluruh para bidang untuk peningkatan nilai SAKIP tahun berikutnya.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi Sakip dan AKIP	BB (75%)	76,60%	102,13 %
2	Indeks Kepuasan Sekretariat	75%	75 %	100%
Rata-rata Capaian				**101,06 %**

Penjelasan :

1. Perbandingan capaian Target dengan realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator kinerja nilai evaluasi Sakip dan Akip yang tercapai sesuai tabel diatas capaiannya 102,13% hal ini dikarenakan kerjasama yang baik serta terbangunnya sinergitas bersama unsur *stakeholders* terkait

2. Target meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel dengan realisasi capaian kinerja 101,06%, indikator kinerjanya adalah nilai evaluasi Sakip dan Akip dari inspektorat dan realiasi nya adalah BB (76,60) serta indeks kepuasan layanan sekretariat yang mencapai 100 %

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Nilai Evaluasi Sakip dan AKIP	75	72,58	75	76,10
2	Indeks Kepuasan Sekretariat	75	75	75	75

Penjelasan :

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Sakip dan Akip yang tercapai sesuai tabel diatas capaiannya 100% hal ini dikarenakan kerjasama yang baik serta terbangunnya sinergitas bersama unsur *stakeholders* terkait.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2026

	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target 2026
1	Nilai Evaluasi Sakip dan AKIP	76.60	82%
2	Indeks Kepuasan Sekretariat	100 %	85%

Penjelasan :

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 belum mencapai Target Renstra 2026. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2025, khususnya sejumlah indikator kinerja yang telah mencapai target jangka menengah, memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja jangka menengah tahun 2026 akan dapat dicapai. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah di lakukan, agar optimisme pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat di wujudkan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah makin meningkatnya kapasitas dan peran serta aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat dalam mengantisipasi masalah-masalah Kantrantibmas, pelayanan terhadap tertib administrasi bagi ormas dan partai politik penerima bantuan keuangan serta menumbuh kembangkan rasa cita tanah air dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat dengan tetap membina sinergitas diantara stakeholder dapat meningkatkan capaian kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dapat terwujud.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah antara lain Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 5 Dokumen , Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD terealiasi sebnyak 1 Dokumen, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD terealiasi sebnyak 1 Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terealisasi 5 Dokumen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah antara lain: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi untuk 37 Orang/Bulan selama 1 Tahun Kegiatan dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuagan SKPD yang terealisasi 270 Dokumen.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah antara lain : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebanyak 1 Paket, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor terealisasi 2 Paket, Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi 2 Paket, Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan yang terealisasi 2 Paket, Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan terealisasi 1 Dokumen, Fasilitasi Kunjungan Tamu terealisasi 4 Laporan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terealisasi sebayak 4 Laporan.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah antara lain : Pengadaan Mebel yang terealisasi sebanyak 2 Unit.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah antara lain: Penyedian jasa Surat menyurat yang terealisasi selama 1 Tahun Kegiatan yaitu 12 Laporan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terealisasi selama 2 Laporan Kegiatan.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah antara lain Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terealisasi sebanyak 3 Unit Kendaraan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang terealisasi sebanyak 10 Unit

Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

N	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	**7.272.291.514**	**6.335.353.598**	**87,58**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	194.450.422	169.903.446	87,12
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	6.464.302.113	5.588.989.459	86,46
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	519.073.328	503.027.042	96,91
4	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	5.000.000	4.880.000	97,60
5	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	26.999.185	20.872.185	77,31
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	62.466.466	47.681.466	76,33

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 87,58% dari 6 (Enam) kegiatan, maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser telah melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp. 936.937.916,- atau 5,61 % dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatun Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Paser

❖ **Analisis atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran 1 meningkatnya pengelolaan keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Sekretariat sebanyak 13 (Tiga Belas) orang sebagai berikut :

1.	Kepala Badan	:	1 Orang
2.	Sekretaris Badan	:	1 Orang
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	:	1 Orang
4.	JF. Perencana Ahli Muda	:	1 orang
5.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sekretariat	:	4 orang
6.	JF. Perencana Ahli Pertama	:	2 orang
7.	Pengadministrasian Perkantoran Pada Sekretariat	:	2 orang
8.	Pengelola Umum Operasional	:	1 orang

Tabel 7 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	100	100	100
Rata-rata Capaian				**100**

Penjelasan :

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 2 Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasiladan Wawasan kebangsaan meningkat dari capaian kinerja tahun sebelumnya dimana capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 sebesar yaitu 100%

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	100	100	100	100

Penjelasan :

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila yang tercapai sesuai tabel diatas capaiannya 100% hal ini diperoleh dari tidak ada kejadian kasus makar ataupun hal-hal yang mengganggu kehidupan beragama masyarakat di Kabupaten paser sehingga rasa nasionalisme dan Cinta Tanah Air dan bangsa antar Masyarakat tetap terjada dan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan langkah aparat keamanan yang sangat intens dan sigap dan melakukan tindakan tegas terhadap Oknum yang melakukan tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kenyamanan hidup dilingkungan masyarakat menjadi penting dengan dukungan koordinasi yang sangat intensif antar FKUB, pemerintah dan *stakeholder* terkait.

Indikator Kinerja		Realisasi 2025	Target 2026
1	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	100	100%

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2026

Penjelasan :

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan Target Renstra 2026. telah mencapai target Renstra. Hal ini membuktikan hubungan harmonis yang terjalin didasari dengan semangat persatuan dan kesatuan yang terbina diantara umat beragama dalam bingkai NKRI serta semakin berperannya masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam menangkal bahaya paham radikalisme dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam upaya semakin meningkatkan rasa Cinta Tanah Air dan Bangsa adalah 100%. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah di lakukan, agar optimismeencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat diwujudkan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah semakin berperannya masyarakat dalam membantu dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan harmonisasi hidup bermasyarakat serta semakin meningkatnya kesadaran Cinta Tanah Air dan Bangsa serta rasa tanggungjawab dalam menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat di Kabupaten Paser.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari Sub. Kegiatan :

b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang terealisasi 3 Dokumen

c. PelaksanaanPelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang terealisasi 517 Orang

d. Pembentukan Paskibraka yang terealisasi 100 Orang

Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

N	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**3.434.660.433**	**3.250.069.260**	**94,63**
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	**3.434.660.433**	**3.250.069.260**	**94,63**

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan Jumlah Anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 94,63% dari 1 (satu) kegiatan maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 184.591.173,- atau 1,106% Dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Paser .

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk dukungan Asta cita Pemerintahan Umum untuk Memperkokoh Ideologi Pancasila antara lain :

1. Sosialisasi Perkuatan Ideologi Wawasan Kebangsaan dengan sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda,Ormas, OKP/LSM dan Pelajar. Serta Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional seperti Pelaksanaan Hari Lahir Pancasila ,Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Bela Negara.
2. Forum Pembauran Kebangsaan meliputi Sosialisasi Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 dengan sasaran Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Wanita.
3. Pembentukan Paskibraka.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 9 (Sembilan) orang sebagai berikut :

1. Kepala Bidang : 1 orang
2. JF. Kebijakan Ahli Muda : 1 Orang
3. Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang : 4 orang
4. Pengadministrasian Perkantoran Pada Bidang : 1 orang
5. Penata Layanan Operasional pada Bidang : 2 orang

Table 8 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 3 Mewujdkan Masyarakat Kabupaten Paser yang Responsif dan bertanggung Jawab dalam Proses dan Partisipasi Politik yang Demokratis

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	80	72,10	90,12
Rata-rata Capaian				**100**

Penjelasan :

Target Mewujdkan Masyarakat Kabupaten Paser yang Responsif dan bertanggung Jawab dalam Proses dan Partisipasi Politik yang Demokratis untuk Tahun 2025 dengan Target 80 % , dan terealisasi 72,20% , Indikator Kinerjanya adalah Fasilitasi Penyelenggaran Pemilu sehingga Nilai Capaian Kinerja adalah 90,12 % . Yang bisa diartikan Kegiatan ini belum mencapai target yang direncanakan

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2024

dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	100	100	72,10	90,12

Penjelasan :

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu yang tercapai sesuai tabel diatas capaian Kinerjanya di tahun 2025 asalah 90,12% hal ini diperoleh karena adanya efisiensi terhadap belanja kegiatan yang berdampak pengurangan volume atau cakupan kegiatan.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2026

	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target 2026
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	72,10	80%

Penjelasan :

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 realiasinya belum melebihi Target Renstra 2026. Hal ini membuktikan bahwa Adanya Efisiensi sangan berpengaruh terhadap belanja kegiatan yang berdampak pengurangan volume atau cakupan kegiatan. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah di lakukan, agar optimisme pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat diwujudkan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah sebagai berikut: :

1. Dukungan Anggaran yang memadai untuk mendorong pencapaian target realisas.
2. Tingginya keterlibatan jumlah orang/sasaran kegiatan dalam mendorong tercapainya realisasi target, Makin meningkatnya kapasitas dan peran serta aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat dalam mengantisipasi masalah-masalah Kantrantibmas, pelayanan terhadap tertib administrasi partai politik penerima bantuan keuangan, terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarkat yang kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Peran Parta Politik , Etika Budaya Politik ,Peningkatan Demokrasi serta semakin meningkatnya kesadaran serta rasa tanggungjawab dalam menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat di Kabupaten Paser.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala daerah serta pemantauan situasi Politik didaerah terdiri dari Sub. Kegiatan:

a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Polirtik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik di Daerah dengan teraliasi 120 Orang. Dari Target yang direncanakan 150 orang.
b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Polirtik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik di Daerah dengan teraliasi 105 Orang.
c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Polirtik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik di Daerah dengan terealisasi 3 Laporan

Data Kegiatan lain yaitu Daftar Peneruma Bantuan Keuangan Parpol; dengan rincian sebagai berikut :

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Parpol Ketua/Bendahara	Nama Bank, No. Rekening & NPWP Parpop	Perolehan Suara Pemilu 2024	(2/12) X Nilai Persuara X Jumlah Perolehan Suara Sebeum Kenaikan (Rp. 5.349)	(10/12) X Nilai Persuara X Jumlah Perolehan Suara Sesudah Kenaikan (Rp. 15.000)	JUMLAH BANTUAN
1	**DPC Partai Kebangkitan Bangsa** 1. Ketua : dr. Fahmi Fadli 2. Bend : Halimatusa'diyah	Bank Kaltimtara 0022339273 76.974.846.8-726.000	61.607	Rp 54.922.641	Rp 70.087.500	Rp 825.010.141
2	**DPC Partai Gerakan Indo - nesia Raya** 1. Ketua : Zulkifli, SH 2. Bend : Sri Nordianti, S.Sos	Bank Kaltimtara 0022888170 02.795.303.3-726.001	8.095	Rp. 7.216.693	Rp 101.187.500	Rp 108.404.193
3	**DPC PDIP** 1. Ketua : Muhamad Saleh, ST 2. Bend : Yeni Wediarti	Bank Kaltimtara 0021592544 02.404.751.6.726-000	8.853	Rp 7.892.450	Rp 10.662.500	Rp 118.554.950
4	**DPD Partai Golongan Karya** 1. Ketua : Ikhwan Antasari,S.Sos 2. Bend. : H. Ambo Pendrei, S.Ip	Bank Kaltimtara 0022864777 02.404.746.6-726.000	31.987	Rp 28.516.411	Rp 399.837.500	Rp 428.353.911
5	**DPD Partai Nasdem** 1. Ketua : Muhammad Jarnawi. SH 2. Bend : Aspiana, S.Sos	Bank Kaltim 0022988743 53.366.438.9-726.000	14.470	Rp 12.900.005	Rp 80.875.000	Rp 193.775.005
6	**DPC Partai Demokrat** 1. Ketua : Abdullah 2 Bend : Hj. Noverie Amelia Parmiesca	Bank Kaltimtara 0021593150 02.245.895.4-726.001	24.876	Rp 22.176.954	Rp 310.950.000	Rp 333.126.954
Total			**149.888**	**Rp 33.625.152**	**Rp 1.873.600.000**	**Rp 2.007.225.154**

Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politikdan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politk dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politk dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	**2.341.078.759**	**2.339.934.195**	**99,95**
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik ,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala daerah serta pemantauan situasi Politik didaerah	2.341.078.759	2.339.934.195	99,95

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan Jumlah Anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 99,95% dari 1 (satu) kegiatan maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.1.144.564,- atau 0,006 % Dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatun Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupa ten Paser .

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk dukungan Asta cita Pemerintahan Umum untuk Stabilitas Sosial dan Politik antara lain :

3. Literasi Pendidikan Politik bagi Kalangan Pelajar (GEN-Z) dalam Mewujudkan Demokrasi yang sehat dan Berkelanjutan di Kab. Paser.dengan Jumlah Peserta 50 Orang
4. Pendataan Kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol se-Kabupaten Paser dengan Jumlah Penerima Bantuan sebanyak 6 Parpol

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 8 (Delapan) orang sebagai berikut :

1. Kepala Bidang : 1 orang
2. JF. Kebijakan Ahli Muda : 1 orang
3. Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang : 2 orang
4. Pengadministrasian Perkantoran Pada Bidang : 1 orang
5. Penata Layanan Operasional pada Bidang : 3 orang

Tabel 9 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 4 Mewujudkan Pembinaan dan Perberdayaan Organisasi Masyarakat

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jumlah Fasilitasi Ormasi	100	127,64	127,64
Rata-rata Capaian				**127,64**

Penjelasan:

Target Mewujdkan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2025 dengan Target 100%, dan terealisasi 127,64%, Indikator Kinerjanya adalah Presentase Jumlah Fasilitasi Ormas sehingga Nilai Capaian Kinerja adalah 127,64%.

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase Jumlah Fasilitasi Ormas	90	100	100	127,64

Penjelasan:

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 untuk Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Ormas yang tercapai sesuai tabel diatas capaian Kinerjanya di Tahun 2025 adalah 127,64 % hal ini diperoleh Karena seluruh Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Presentase Jumlah Fasilitasi Ormas terlaksana dengan Baik dengn bukti semakin banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang melaporkan Keberadaannya dan Aktif melaporakan Kegiatanya yang dilaksanakan dikabupaten paser ini.Selain itu terbentuknya Timdu Organisasi Kemasyarakatan .

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2026

	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target 2026
1	Persentase Jumlah Fasilitasi Ormas	127,64	100%

Penjelasan :

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 realiasi Capainyan Kinerjanya telah melebihi Target Renstra 2026. Hal ini membuktikan hubungan harmonis yang terjalin didasari dengan semangat persatuan dan kesatuan yang terbina terhadap Organisasi Kemasyarakatan serta Kegiatan Pengawasan Ormas serta semakin berperannya masyarakat dan seluruh *stakeholder.* Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah di lakukan, agar optimisme pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat diwujudkan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah sebagai berikut

Tingginya keterlibatan jumlah orang / sasaran kegiatan dalam mendorong tercapainya realisasi target, makin meningkatnya kapasitas dan peran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat dalam mengantisipasi masalah – masalah yang timbul mengenai Pemberdayaan Oganisasi Kemasyarkatan, OKP, LSM, Yayasan dan Paguyuban serta Pengawasan Ormas yang ada diKabupaten paser dengan terbentuknya timdu Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Paser

Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan terdiri Sub. Kegiatan :

a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Orang Asing didaerah dengan terealisasi 289 Orang dari Target sebanyak 200 Orang.
b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi danMediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas Orang Asing didaerah dengan terealisasi 120 Orang.
c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas Orang Asing didaerah dengan terealisasi 2 Laporan.

Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Pembinaan dan Perberdayaan Organisasi Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Pembinaan dan Perberdayaan Organisasi Masyarakat.	**356.455.379**	**353.550.702**	**99,19**
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	**356.455.379**	**353.550.702**	**99,19**

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan Jumlah Anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 99,19 dari 1 (satu) kegiatan maka 5 dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 2.904.677,- atau 0,017 % Dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatun Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Paser .

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk dukungan Asta cita Pemerintahan Umum untuk Stabilitas Sosial dan Politik antara lain :

1. Pembinaan Ormas dalam rangka memperkuat Peran Ormas untuk mendorong kemajuan Masyarakat dan menjaga Kondusifitas Daerah dengan Tema "Meningkatkan kemandirian dan Profesionalisme Ormas dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung Pembangunan sosial Masyarakat demi mewujudkan “Paser Tuntas" sebanyak 100 Orang.
2. Kegiatan Kemitraan Ormas dan Perguruan Tinggi dalam rangka memperkuat Stabilitas Daerah yang Kondusif dan Harmonis dengan Tema "Mewujudkan Stabilitas Sosial, politik dan Keamanan Serta Mengatisipasi Munculnya Berita-Berita Hoax Ujaran Kebencian dan Tindakan Provokasi sebanyak 150 Orang.
3. *Coffee Morning* Bersama Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka Sinergi Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dengan Jumlah Peserta 50 Orang.
4. *Coffee Morning* Bersama Ormas dalam rangka membangun komunikasi, kolaborasi dan sinergi yang efektif demi mewujudkan PASER TUNTAS sebanyak 50 Orang.
5. Kegiatan lain adalah Pendataan Organisasi Kemasyarakan sebagai rekapitulasi berikut:

REKAPITULASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN PER- 5 TAHUN
TAHUN 2025

JENIS ORGANISASI		TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Organisasi Kemasyarakatan						
1	**PAGUYUBAN**	17	17	18	19	21
2	**ORGANISASI KEPEMUDAAN (OKP)**	45	45	0	44	44
3	**ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)**	141	147	153	164	174
4	**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)**	64	64	64	65	66
5	**YAYASAN**	88	91	91	93	95

NO	KATEGORI ORMAS	AKTIF	TIDAK AKTIF
1	PAGUYUBAN	6	15
2	ORGANISASI KEPEMUDAAN (OKP)	1	43
3	ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)	47	127
4	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)	5	61
5	YAYASAN	6	89
	JUMLAH	**65**	**335**
	TOTAL	**400**	**Orkemas**

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 8 (Delapan) orang sebagai berikut :

1. Kepala Bidang : 1 orang
2. JF. Analis Kebijakan Ahli Muda : 1 Orang
3. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang : 2 orang
4. Pengadministrasian Perkantoran pada Bidang : 1 orang
5. Penata Layanan Operasional pada Bidang : 3 orang

Tabel 10 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 5 Mewujudkan ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kebijakan bidang Katahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang ditindak Lanjuti	100	21,34	21,34
Rata-rata Capaian				**21,34**

Penjelasan :

Target persentase Kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama untuk Tahun 2025 adalah 100% realisasi yang dicapai adalah 21,34% sehingga capaian kinerja adalah 21,34% hal ini disebabkan Karena Pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan di Triwulan IV dan kurangnya Koordinasi dengan Pengurus Tim menyebabkan Kegiatan ini tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase Kebijakan bidang Katahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agamay ang ditindak Lanjuti	100	100	100	21,34

Penjelasan :

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 untuk Indikator Kinerja persentase Kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial, Budaya dan Agama sesuai tabel diatas capaian Kinerjanya di Tahun 2025 adalah 21,34 % hal ini diperoleh Karena Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja yang dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya , kegiatan dilaksanakan ditriwulan IV Tahun 2025

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2026

	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target 2026
1	Persentase Kebijakan bidang Katahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang ditindak Lanjuti	21,34	100%

Penjelasan :

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 bahkan ada yang telah Tidak sesuai dengan Renstra. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2025 memberi harus memperbaiki bahwa target indikator kinerja pada Renstra yang baru tahun 2025-2029 sehingga Tahun Jangka jangka menengah tahun 2026 akan dapat dicapai.

Adapun faktor Penghambat dari indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan tidak mempunyai waktu yang cukup karena penambahan anggaran tes urine terjadi dianggaran perubahan (November 2025).

2. Fokus pelaksanaan Tes Urine diprioritaskan kepada Siswa/Siswi SLTA se-Kabupaten Paser dan Kepala Desa sehingga waktu yang tersedia untuk Unsur lainnya tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terdiri dari Sub. Kegiatan :

a. Penyusunan Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umam Bergaman dan Penghayat Kepercaayaan Didaerah dengan realisasi sebanyak 3 Dokumen dari targat yang di rencanakan sebanyak 3 Dokumen.
b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan didaerah dengan realisasi sebanyak 400 orang dari Target sebesar 1.900 Orang.
c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercaayaan Didaerah dengan realisasi sebanyak 4 Laporan. Dari target yang di rencanakan sebanyak 4 Laporan.

Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pembinaan dan Pengem -bangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**1.185.419.812**	**774.748.767**	**65,36**
Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi . Sosial Budaya dan Agama.	1.185.419.812	774.748.767	65,36

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan Jumlah Anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 65,36% dari 1 (satu) kegiatan maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser ttidak dapat menyerap atau merealisasikan Anggaran sebesar Rp 410.671.045,- atau 2,46 % dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Paser .

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk dukungan Asta cita Pemerintahan Umum untuk Memperkokoh Ideologi Pancasila antara lain :

1. Pendataan Harga Pasar melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah

2. Kegiatan yang dilkukan oleh Badan Narkotika Kabupaten Paser seperti Sosialisasi Undang-Undang Narkotika dan Pelaksanaan Test urine bagi Pelajar SLTA sederajat

3. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 8 (Delapan) orang sebagai berikut :

1.	Kepala Bidang	:	1 orang
2.	JF. Kebijakan Ahli Muda	:	1 orang
3.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang	:	4 orang
4.	Pengadministrasian Perkantoran Pada Bidang	:	1 orang
5.	Penata Layanan Operasional pada Bidang	:	2 orang

Table 11 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 6 Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga Kondusifitas yang tertib dan Aman

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan	100	95,15	95,15
Rata-rata Capaian				**95,15**

Penjelasan :

Target persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan untuk Tahun 2025 secara umum kondisi daerah Kabupaten Paser aman dan kondusif tidak ada hal-hal yang menonjol yang dapat mnimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kantrantibmas. Untuk Tahun 2025 realisasi capaian Kinerja 95,15% hal ini disebabkan kurang nya koordniasi dengan Pihak terkait sehungga ada Sebagian Kwgiatan tidak dapa terlaksana,

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan	100	100	96,15	96,15

Penjelasan :

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 untuk Indikator Kinerja persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan sesuai tabel diatas capaian Kinerjanya di Tahun 2025 95,15% hal ini diperoleh Karena Adan Sebagian Sub. Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja yang dilaksanakan belum terlaksana sesuai dengan Program, pada Renja Badan Kesbangpol Kab. Paser.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2026

	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target 2026
1	Persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan	96, 15	100%

Penjelasan :

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 belum sesuai dengan target Renstra. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2025 Badan Kesatuan bangsa dan poliyik akan terus berrusaha untuk mengkatkan Kinerjanya dalam hal menurunnya tindak kriminalitas dimasyarakat memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja jangka menengah tahun 2026 akan dapat dicapai. Adapun faktor Penghambat dari indikator diatas adalah debagai berikut :

1. Adanya Keterbatasan waktu untuk melaksanakan Kegiatan .
2. Perubahan Anggota Personil pada Surat Keputusan dan harus menunggu SK Perubahan Selesai Dibuat menyebabkan proses pertanggung jawaban berkas untuk kegiatan pencairan honorarium dan lain-lainnya serta pelaksanaan kegiatan mengalami kertelambatan sampai habis tahun berjalan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terdiri dari Sub. Kegiatan :

a. Penyusunan Program Kerja dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang, serta Penanganan Konflik didaerah. Yang terealisasi sebanyak 2 Dokumen
b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang, serta Penanganan Konflik didaerah. Yang terealisasi sebanyak 2 Dokumen
c. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang, serta Penanganan Konflik didaerah. Yang terealisasi sebanyak 20 Orang
d. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang, serta Penanganan Konflik didaerah. Yang terealisasi sebanyak 20 Orang
e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang, serta Penanganan Konflik didaerah. Yang terealisasi sebanyak 5 Laporan dari Target 6 Laporan
f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota Yang terealisasi sebanyak 1 Laporan dari Target 2 Laporan

Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Peningkatan Kewaspadaan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	**2.088.608.730**	**1.553.835.495**	**74,56**
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial .	2.088.608.730	1.553.835.495	74,56

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan Jumlah Anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 74,15% dari 1 (satu) kegiatan maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser telah melakukan efisiensi

anggaran sebesar Rp 278.846.624,- atau 0,55 % dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Paser .

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk dukungan Asta cita Pemerintahan Umum untuk Memperkokoh Ideologi Pancasila antara lain :

1. Rapat Koordinasi Forkopimda menyikapi permasalahan yang berkembang di daerah untuk mengambil kebijakan dan keputusan kondusifitas daerah tetap terjaga agar pembangunan Nasional dan program strategis Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar
2. Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Paser (TKDPD)
3. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan dan Desa se Kabupaten Paser (FKDM)
4. Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing (Tim POA)
5. Monitoring, Pengumpulan Informasi Intelijen, dan kegiatan intelijen lainnya yang mencakup bidang IPOLESOSBUDHANKAM yang bernilai ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) oleh Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
6. Monitoring, pelaporan potensi ATHG serta fasilitasi pencegahan potensi konflik oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan dan Desa se Kabupaten Paser, serta melakukan pembinaan FKDM Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Rakor FKDM se Kabupaten Paser.
7. Monitoring, Pengumpulan Informasi Intelijen untuk melakukan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kab.Paser.
8. Melakukan Identifikasi dan Pemetaan Daerah rawan konflik melalui aplikasi SIMONTOKS Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim dan pembuatan potensi konflik berbasis ekonomi dan SDA berdasarkan hasil monitoring lapangan.
9. Penyusunan rekomendasi penyelesaian masalah aktual oleh Tim TKDPD dan FKDM sebagai bahan masukan ke Bupati dan Forkopimda guna pengambilan keputusan atau kebijakan

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebanyak 7 (Tujuh) orang sebagai berikut :

1. Kepala Bidang : 1 orang
2. JF. Kebijakan Ahli Muda : 1 orang
3. Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang : 1 orang
4. Pengadministrasian Perkantoran Pada Bidang : 1 orang
5. Penata Layanan Operasional pada Bidang : 3 orang

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2025 belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, Alokasi dan realisasi kinerja keuangan Tahun 2025 sebesar 87,58% di uraikan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Belanja (Rp).	Realisasi Belanja (Rp).	Capaian (%)
BELANJA	16.678.514.625	14.431.929.117	87,58
BELANJA OPERASI	16.678.514.625	14.431.929.117	87,58
Belanja Pegawai	6.275.355.604	5.405.366.533	86,14
Belanja Barang dan Jasa	8.212.266.109	7.019.337.430	85,47
Belanja Hibah	2.007.285.000	2.007.225.154	100
BELANJA MODAL	183.607.912	175.570.900	95,62
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.607.912	175.570.900	95,62

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang didukungnya tersaji secara rinci pada lampiran 3:

Table 14. Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Sampai Dengan Tahun 2025

NO.	Tahun	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)
1.	2021	***80,16***	***80,16***
2.	***2022***	***95,43***	***95,43***
3.	***2023***	***96,34***	***96,34***
4.	***2024***	***99,46***	***96,45***
5.	***2025***	***89,21***	***87,58***
.			
Rata-rata		***92,12***	***91,18***

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi pencapaian kinerja Badan Kesatuaan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mengalami penurunan jika dibanding dengan pencapaian pada tahun sebelumnya, tercatat capaian kinerja naik sebesar 10,25 % dari tahun 2025,

C. PERMASALAHAN

1. Perlunya ditingkatkan pengelolaan anggaran baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja;
2. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing Kepala Bidang sehingga target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai;
3. Bagaimana cara Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program / kegiatan
4. Penggunaaan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser harus lebih diberdayakan secara menyeluruh, efektif, dan efisien.

D. ANALISIS KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN

Faktor pendorong keberhasilan dan kegagalan yang berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser adalah :

- Penetapan IKU dan Target indikator belum sepenuhnya didukung dengan formulasi dan mekanisme pengumpulan/pengukuran data kinerja yang memadai. Reviu terhadap indikator kinerja dan target kinerja tidak secara rutin dilakukan, akibat koordinasi yang masih belum optimal, proses revisi/reviu dokumen perencanaan belum terarah, pengendalian dan evaluasi belum berjalan seperti harapan.
- Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang *(cascading)* sampai ke level terendah.
- Regulasi penyeragaman nomenklatur program/kegiatan ditetapkan di akhir masa Renstra (Permendagri nomor 90 tahun 2019).
- Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja “Baik”.
- Terpenuhnya Sarana dan Prasarana Kantor Seperti Laptop, PC, Tablet , Printer dan Kamera
- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 6 program dan 11 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.426.345.764,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp 5.911.790.846,00 (91,99%) yang diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Pengaangaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang terealisasi 11 Dokumen,

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah antara lain: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi untuk 36 Orang/ Bulan selama 1Tahun Kegiatan dan Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuagan SKPD yang terealisasi 270 Dokumen,

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah antara lain: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebanyak 1 Paket. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor terealisasi sebanyak 1 Paket, Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi sebanyak 2 Paket, Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan yang terealisasi sebanyak 2 Paket , Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan terealisasi 2 Dokumen, Fasilitasi Kunjungan Tamu yang terealisasi sebanyak 4 Laporan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terealisasi sebanyak 4 Laporan.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah antara lain : Pengadaan Mebel yang terealisasi sebanyak 1 Unit.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah antara lain: Penyedian jasa Surat menyurat yang terealisasi selama 1 Tahun Kegiatan sebanyak 4 Laporan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terealisasi selama 12 Laporan .

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah antara lain Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terealisasi sebanyak 3 Unit Kendaraan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang terealisasi sebanyak 4 Unit dari target 10 unit

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.434.660.433,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp 3.250.069.260,00 (94,63%) yang diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terealisasi umtuk 3 Dokumen, 517 Orang dan 100 Orang (Pembentukan Paskibraka).

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp2.341.078.759,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp2.339.934.196,00 (99,94 %) yang diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan yang terea;isasi umtuk 120 Orang,105 Orang dan 6 Parpol dan 3 Laporan.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 356.455.379,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp 353.550.702,00 (99,19%).

Yang diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdaaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang terealisasi untuk 2 Laporan dan 289 Orang serta 120 Orang.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.185,419.812,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp 774.748.767,00 (65,36 %) yang diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial Budayadan Agama yang terealisasi untuk 3 Dokumen, 4 Laporan dan 400 orang dari tanget yang direncanakan sebanyak 1.900 Orang.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.088.608.728,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp 1.553.835.495,00 (74,40%) yang diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terealisasi untuk 2 Dokumen, 2 Dokumen, 20 Orang, 20 Orang, 5 Laporan, 1 Dokumen.

PENGUKURAN KINERJA DAN KEUANGAN
SASARAN STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

Sasaran Strategis I :				**Program :**		
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Oranisasi yang kuntabel				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Kinerja Program	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**		
				Pagu	**Realisasi**	**%**
Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75	76,60	100	7.272.291.514	6.335.353.598	87, 12
Sasaran Strategis II :				**Program :**		
Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila	100	100	100	3.434.660.433	3.250.069.260	94, 63
Sasaran Strategis III :				**Program :**		
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang Responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan Partisipasi Politik yang Demokratis				Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		
Partisipasi Penyelenggaran Pemilu	80%	90,12	90,12	2.341.078.759	2.339.934.195	99, 95
Sasaran Strategis IV :				**Program :**		
Mewujudkan Pembinaan dan Pememberdayaan Organisasi Kemasyarakatan				Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**		
				Pagu	**Realisasi**	**%**
Persentase Organisasi Masyarakat yang difasilitasi	100%	127,64	127,64	356.455.379	353.550.702	99,19
Sasaran Strategis V :				**Program :**		
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama				Pembinaan dan Pengembagan Keta -hanan Ekonomi,Sosial dan Budaya		
Indikator Kinerja Program	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**		
				Pagu	**Realisasi**	**%**
Fasilitasi Kebijakan dibidang Ekonomi .Sosial,Budaya dan Agama	100	21,34	21,34	1.185.419.812	774.748.767	65,36
Sasaran Strategis VI :				**Program :**		
Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga Kondisifitas yang tertib dan aman				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah abupaten/Kota		

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	96,15	96,15	2.088.608.728	1.553.835.495	74,56

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp. 16,678,514,625,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan 2025 : Rp. 14,607,492,017 (87,58)

BELANJA PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URAIAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	KENDALA	PENDORONG
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7 (6 : 5 X 100)	8	9	10 (9 : 8 X 100)	11	12	13
98	**8.01.0.00.0.00.00.0000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**16.678.514.625**	**14.607.500.017**	**87,58**	**87,88**		
	8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Sekertariat**				**7.272.291.514**	**6.335.361.598**	**87,12**			
	8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**194.450.422**	**169.903.446**	**87,38**			
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	106.538.922	91.648.843	**86,02**			
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	39.602.400	33.280.794	**84,04**			
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	18.224.500	15.560.822	**85,38**			
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	30.084.600	29.412.987	**97,77**			
	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah**	**97%**			**6.464.302.113**	**5.588.989.459**	**86,46**			
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bulan	36 Org/Bulan	120	6.267.555.604	5.397.566.533	**86,12**			
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	270 Dokumen	270 Dokumen	100	196.746.509	191.422.926	**97,29**			
	8.01.01.2.06	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Admini strasi Umum Daerah**				**519.073.328**	**503.027.042**	**96,91**			
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	2.304.651	2.303.000	**99,93**			
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100	180.118.996	171.352.900	**95,13**			
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang tersedia	2 Paket	2 Paket	100	50.100.000	50.070.819	**99,94**			
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100	34.493.735	32.026.047	**92,85**			
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5.000.000	2.700.000	**54,00**			
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	100	3.479.000	3.375.000	**97,01**			
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	243.576.946	241.199.276	**99,02**			
	8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Pemerintah Daerah**				**5.000.000**	**4.888.000**	**97,76**			
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100	5.000.000	4.888.000	**97,76**			
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**26.999.185**	**20.872.185**	**77,31**			
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	4 Laporan	100	12.000.000	9.455.000	**78,79**			
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunukasi, jaringan sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12 Laporan	12 Laporan	100	14.999.185	11.417.185	**76,12**			
	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**				**62.466.466**	**47.681.466**	**76,33**			
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	3 Unit	100	35.966.466	35.966.466	**100,00**			
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	10 Unit	4 Unit	40	26.500.000	11.715.000	**44,21**			
	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Presentase Penurunan Konflik Berbau Sara**				**3.434.660.433**	**3.250.069.260**	**94,63**			
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Terlaksananya Perumusan Teknis dibidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**100**	**100**	**3.434.660.433**	**3.250.069.260**	**94,63**			
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	185.022.770	151.190.070	**81,71**			
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	517 Orang	517 Orang	100	517.573.652	503.355.069	**97,25**			
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan Pembentukan Paskibraka	100 Orang	100 Orang	100	2.732.064.011	2.595.524.121	**95,00**			
	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu**				**2.341.078.759**	**2.339.934.195**	**99,95**			

	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan**	**Terlaksananyan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah . Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi**	**100**	**90,12**	**90,12**	**2.341.078.759**	**2.339.934.195**	**99,95**		Adanya Efisiensi terhadap belanja kegiatan yang berdampak pengurangan volume atau cakupan kegiatan	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	150 Orang	120 Orang	80	56.375.000	55.649.363	**98,71**			
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	105 Orang	105	2.196.881.542	2.196.789.813	**100,00**			
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sittuasi Politik di Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100	87.822.217	87.495.019	**99,63**			
	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Presentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang aktif**				**356.455.379**	**353.550.702**	**99,19**			
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan**	**100**	**127,64**	**127,64**	**356.455.379**	**353.550.702**	**99,19**			Tingginya keterlibatan jumlah orang/sasaran kegiatan dalam mendorong tercapainya realisasi target
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	289 Orang	144,5	241.771.901	240.689.929	**99,55**			
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	120 Orang	100	64.591.739	63.827.349	**98,82**			
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100	50.091.739	49.033.424	**97,89**			
	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Presentase kebijakan bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti**				**1.185.419.812**	**774.748.767**	**65,36**			
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**100**	**21,34**	**21,34**	**1.185.419.812**	**774.748.767**	**65,36**		1. Pelaksanaan kegiatan tidak mempunyai waktu yang cukup karena penambahan anggaran tes urine terjadi dianggaran perubahan (November 2025) 2. Fokus pelaksanaan Tes Urine diprioritaskan kepada Siswa/Siswi SLTA se-Kabupaten Paser dan Kepala Desa sehingga waktu yang tersedia untuk unsur lainnya tidak dapat terlaksana sepenuhnya	
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	498.051.020	336.738.482	**67,61**			
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					-	-	-			
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1900 Orang	400 Orang	21,05	651.147.700	413.481.985	**63,50**			

	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	36.221.092	24.528.300	**67,72**			
	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN**	**Presentase kasus konflik sosial yang tertangani / terselesaikan**				**2.088.608.728**	**1.553.835.495**	**74,40**			
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social yang dirumuskan**	**100**	**96,15**	**96,15**	**2.088.608.728**	**1.553.835.495**	**74,40**		Adanya keterbatasan waktu dan belum terbitnya SK perubahan personil	
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	25.237.884	21.727.698	**86,09**			
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	78.798.904	72.632.685	**92,17**			
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	20 Orang	20 Orang	100	102.450.000	76.450.018	**74,62**			
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	20 Orang	20 Orang	100	403.285.000	376.539.168	**93,37**			
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	6 Laporan	5 Laporan	83,33	225.000.000	167.750.086	**74,56**			
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupa-ten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	50	1.253.836.940	838.735.840	**66,89**			
		TOTAL					**16.678.514.625**	**14.607.500.017**	**87,58**			

Catatan :
1. Target sasaran strategis, program, dan kegiatan yang tidak tercapai mohon diberi penjelasan penyebabnya dan solusinya
2. Target sasaran strategis, program, dan kegiatan yang capaiannya di atas 100% mohon diberi penjelasan faktor penyebabnya

TANA PASER, 09 JANUARI 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nonding, S.Sos. M.M
NIP. 19710607 199703 1 007

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1) Capaian kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol sebesar 76,60% (BB) Artinya Sangat Baik.
2) Capaian kinerja Presentasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 100% (Sangat Berhasil).
3) Capaian kinerja Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budan Politik sebesar 90,12% (Tinggi).
4) Capaian kinerja Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 127,64% (Sangat Berhasil).
5) Capaian kinerja Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar 21,34% (Sangat Rendah).
6) Capaian kinerja Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial sebesar 96,15% (Tinggi).

Capaian kinerja tahun 2025 adalah 89,21% mengalami menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 96,34% atau terjadi penurunan kinerja sebesar 7,13%

LKjIP tahun 2025 merupakan kelanjutan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Penyajian data LKjIP ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Selain itu, menyangkut capaian sasaran ditemukan :

1. Hanya 2 Indikator yang Capaian sasaran sangat memuaskan yaitu Sasaran I dan Sasaran III sedangkan Sasaran II dan Sasaran VI menunjukan hasil tinggi dan 1 Indikator sasaran Strategis V memperoleh hasil Sangat Rendah, dengan ini untuk

Tahun yang akan Badan Kesbangpol Berkomitmen akan mengatur stategi yang lebih baik lagi agar Penetapan target dapat tercapai dengan baik.

2. Sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang sangat Berhasil, terutama pada indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditentukan harus dilaksanakan.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DIMASA YANG AKAN DATANG

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025, dapat disarankan perbaikan sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2025, khususnya pada pada Sasaran Strategis Mewujudkan Ketahanan Ekonomi sosial, Budaya dan Agama yang sasaran target nya sangat rendah dan peningkatan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan dan tentang pendidikan politik masyarakat;
2. Mengupayakan sinergi kegiatan antar unit kerja agar dilaksanakan secara bersama untuk optimalisasi kegiatan (hasilnya komprehensif) yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pemangku kepentingan kesbangpol dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga tidak tumpang tindih serta efisiensi waktu dalam pelaksanaannya;
3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja;
4. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada lingkup setiap unit kerja, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
5. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing Kepala Bidang sehingga target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai;
6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan dan anggaran lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan /keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan..
8. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan

9. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
10. Menguatkan komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

C. SUMBER DATA KINERJA

Adapun sumber data kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Hasil monitoring dan evaluasi tim internal Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
2. BAPPEDA Kabupaten Paser
3. BPKAD Kabupaten Paser
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser
5. POLRES Paser
6. KODIM 0904 Paser
7. BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur

Akhirnya, besar harapan dengan adanya Laporan Kinerja ini, setiap anggota organisasi dapat termotivasi untuk memacu pelaksanaan tugasnya masing-masing dengan menata kembali seluruh sumber daya yang dimiliki yang berada dalam tanggung jawabnya sehingga secara nyata dapat berguna bagi perbaikan kinerja organisasi.

Tanah Grogot, 05 Februari 2026
Kepala Badan,

Nonding ,S.Sos,MM
Pembina Utama Muda/VI c
NIP. 197106071997031007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nonding, S.Sos,MM

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : dr. Fahmi Fadli

Jabatan : Bupati Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Bupati Paser,	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser,
dr. Fahmi Fadli	Nonding,S.Sos, MM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi Yang akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	80
2.	Mewujudkan masyarakat kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis	Failitasi penyelenggaraan pemilu	80%
3.	Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas)	Persentase Organisasi Masyarakat yang difasilitasi	100%
4.	Mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%
5.	Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusitifitas yang tertib dan aman	Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	100%
6.	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	100%

PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN
1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	194.450.422
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	6.464.302.113
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	519.073.328
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	5.000.000
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	26.999.185
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	62.466.466
2. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	7. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Kepala Daerah,serta Pemantauan situasi Politik diderah	Rp	2.341.078.759

3. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	356.455.379
4. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya	Rp	1.185.419.812
5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasiomal dan Penanganan Konflik Sosial	Rp	2.088.608.728
6. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	3.434.660.433

Tanah Grogot, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Bupati Paser,

dr. Fahmi Fadli

PIHAK PERTAMA
Kepala Badan Kesbangpol

Nonding.S.Sos.MM

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1
Uraian Sasaran/

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi Yang akuntabel lebih spesifik spesifik Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kab. Paser yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, dalam mencapai kinerja
Dasar HukumPencapaian kinerja ini antara lain :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negera dan Reformasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusuan Indikator Kinerja Utama

2. Peratuan Darah Kabupaten Paser No 4 Tahun 2021 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Paser tahun 2021- 2026

3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Kondisi yang ingin dicapai dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kab. Paser dengan capaian yang terukur dari hasil evaluasi internal Kabupaten yaitu meningkatnya nilai Sakip Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kab. Paser .

Indikator Kinerja
Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi Yang akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kab. Paser	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kab. Paser	Laporan Realisasi Kinerja dan realisasi penggunaan anggaran semua Bidang pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kab. Paser

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	80	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 72,58 dan capaian tahun 2024 sebesar 76,30

Penjelasan Kinerja 2
Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Mewujudkan masyarakat kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis.	Tujuan Penyelenggaran Pemilu adalah melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak azasi warga Negara. Untuk mejamin Penyelenggaran Pemilu dapat berjalan dengan tertib dan aman diperlukan Upaya / Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu.l	Jumlah masyarakat yang mengikuti partisipasi politik ---------- X 100 % Jumlah partisipasi politik	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu	80 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 80%,

Penjelasan Kinerja 3
Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas). Artinya Tumbuhnya Organisasi Kemasyarakatan secara masif dengan beragam platfrom yang sering menimukan gesekan – gesekan dimasyarakat mengharuskan pemerintah untuk mengawal kemerdekaan berserikat berkumpul tersebut. Tantangan terbesar dalam mengelola Organisasi Masyarakat adalah mengarahkan Keberadaan nya agar bermanfaat bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Indikator Kinerja
Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormasy dikabupaten Paser harus lebih ditingkatkan terciptanya Hubungan yang Harmonis antara Masyarakat, Orgnisasi Kemasyarakatan dan Pemerintah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang masih aktif ---------- X 100% Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar	BIDANG POLITIK DALAM EGERI DAN ORGANISASI KEMASYA-RAKATAN

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Organisasi Masyarakat yang difasilitasi	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 100 %

Penjelasan Kinerja 4
Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama Dalam rangka mewujudkan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pemerintah perlu menetapkan Kebijakan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya guna menghindari Permasalahan yang timbul dimasyarakat . Salah satu Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika danFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam sasaran kinerja ini adalah menjadikan lebih maju dan mandiri dengan tumbuh dan berkembangnya usaha berbagai sektor yang meningkatkan kemampuan ekonomi , Sosial dan Budaya masyarakat di Kabupaten Paser.

Indikator Kinerja
Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama Fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Untuk Mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama perlu dilakukan Kegiatan usaha bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya , sehingga Masyarakat di Kabupaten Paser dapat tumbuh menjadi Masyarakat baru yang mandiri	Jumlah terlaksananya peningkatan wawasan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama tahun (n) ---------- X 100% Jumlah sosialisasi tahun (n)	BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANG SAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 adalah 100 %

Penjelasan Kinerja 5
Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusitifitas yang tertib dan aman. Untuk mewujudkan Stabiilitas Keamanan dan Ketertiban dikabupaten Paser perlu dilakukan Upaya Pencegahan antara lain melakukan Pembinaan antar suku dan Intra suku , Umat beragama , Ras, dan Golongan lainnya serta meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penanganan sebelum, saat dan pasca konflik guna mewujudkan stabilitas keamanan Daerah.

Indikator Kinerja
Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusitifitas yang tertib dan aman.	Meningkatkanya Kondusifitas yang tertib dan Aman di Kabupaten Paser dapat mengurangi Potensi Konflik yang sering terjadi dikalangan Masyarakat . untuk itu perlu Kerjasama yang intens dilingkungan Jajaran Pemerintah, Organisasi, maupun Masyarakat.	Jumlah konflik sosial yang terselesaikan ---------- X 100% Jumlah Konflik Sosial yang ada	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	100%	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 adalah 100 %

Penjelasan Kinerja 6
Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan Pemahaman Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan , perlu dilakukan Guna Peningkatan Nilai Moral warga Negara Indonesia. Upaya menjaga dan menguatkan Nilai Nilai Pancasila dimasa sekarang dimasyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal yaitu Pendekatan Budaya, Internalisasi disemua level Pendidikan dan Penegakan hukum terhadap hal - hal yang tidak sejalan dengan nilai — nilai pancasila.

Indikator Kinerja
Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Banyaknya Masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa dapat dilihat dari peningkatan persentase Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi pancasila yang sesuai Kegiatan Sosialisasi dari Tahun ke Tahun	Jumlah Persentase penurunan konflik yang berbau sara ---------- X 100% Jumlah Sosialiasi tahun (n)	BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANG SAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	100 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2024 sebesar 100%

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Email: kesbangpol_paseryahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hatimah,S.Sos,M.Si

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Nonding. S.Sos,.M.M

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 22 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kepala Badan,	Sekretaris,
Nonding,S.Sos,M.M	**Hatimah ,S.Sos. M.Si**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi SALIP dan APIP	80

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 7.272.291.514

Tana Paser, 22 Oktover 2025

KEPALA BADAN,

NONDING,S.Sos,M.M

SEKRETARIS,

HATIMAH,S.Sos,M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Email: kesbangpol_paser@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hatimah,S.Sos,M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi , Sosial,Budaya dan Agama

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Nonding. S.Sos,.M.M

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 22 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kepala Badan,	Plt.Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya dn Agama
NONDING,S.Sos,M.M	**HATIMAH,S.Sos,M.Si**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujundkan Ketahan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Fasilitasi Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100%
2.	Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahansm zrkonomi Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi .Sosial dan Budaya**	Rp. . 1.185.419.812-

Tana Paser, 22 Oktober 2025

KEPALA BADAN,

NONDING,S.Sos,M.M

Plt.Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

HATIMAH,S.Sos,M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Email: kesbangpol_paser@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Hartono,S,Sos,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***
Nama : Nonding. S.Sos,.M.M
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 22 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kepala Badan,	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Nonding,S.Sos,M.M	**Achmad Hartono,S.Sos,M.Si**

PERJANJIAN KINERJA PWEUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
.1	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang responsive dan Bertanggung Jawab dalam Proses dan Partisipasi politik yang demokratis	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	80%
2.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Dokumen	

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. .2.341.078.759,--

Tana Paser,22 Oktober 2025

KEPALA BADAN,

NONDING,S.Sos,M.M

Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

ACHMAD HARTONO,S.Sos,M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Email: kesbangpol_paseryahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Hartono ,S.Sos,M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Nonding. S.Sos,.M.M

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 22 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kepala Badan,	Plt,Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik
Nonding,S.Sos,M.M	**ACHMAD HARTONO,S.Sos,M.Si**

PERJANJIAN KINERJA PWEUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
.1	Meningkatkan Kewaspadaan dalam Menjaga Kondusifitas yang tertib dan aman.	Terwujudnya Stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser.	100%
2.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspada an Nosional dan Penangan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen	

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	Rp. 2.088.608.728-

Tana Paser, 22 Oktober 2025

KEPALA BADAN,

NONDING,S.Sos,M.M

Plt.Kabid Kewaspadaan Nasional
dan Penangan Konflik

ACHMAD HARTONO,S.Sos,M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Email: kesbangpol_paseryahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hatimah,S.Sos,M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi , Sosial,Budaya dan Agama

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Nonding. S.Sos,.M.M

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama.

Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 22 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kepala Badan,	Plt.Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya dn Agama
NONDING,S.Sos,M.M	**HATIMAH,S.Sos,M.Si**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	100%
2.	Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen

PROGRAM	ANGGARAN
1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Rp. . 3.434.660.433,-

Tana Paser, 22 Oktober 2025

KEPALA BADAN,

NONDING,S.Sos,M.M

Plt.Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

HATIMAH,S.Sos,M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Email: kesbangpol_paseryahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Hartono,S,Sos,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***
Nama : Nonding. S.Sos,.M.M
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku atasan langsung pihak pertama.
Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 22 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kepala Badan,	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Nonding,S.Sos,M.M	**Achmad Hartono,S.Sos,M.Si**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
.1	Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormasy.).	Presentasi Organisasi Masyarakat yang difasilitasi. ilu	100%
2.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kema-syarakatan	Jumlah Dokumen	

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. . 356.455.379-

Tana Paser, 22 Oktober 2025

KEPALA BADAN,

NONDING,S.Sos,M.M

Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

ACHMAD HARTONO,S.Sos,M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Email: kesbangpol_paseryahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanik Yanuati, SP
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***
Nama : Hatimah,S.Sos,M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 22 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Sekretaris,	Kasubbag, Umum dan Kepegawaian.
Hatimah,S.Sos,M.Si	**Hanik Yanuati ,SP**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Paket
2.	Tersedianya peralatan dan Perleng - kapan Kantor.	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor	2 Paket
3.	Tersedianya bahan logistic kantor yang tersedia	Jumlah paket bahan logistic kantor yang tersedia	2 Paket
4.	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 Paket
5.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 Dokumen
6.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjunan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
7.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan
8.	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit
9.	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia	4 Lporan
10.	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia.	12 Laporan
11.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	2 Unit
12.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit

SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	
1. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp.	2.304.651,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	180.118.996,-
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	50.100.000,-
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Rp.	33.493.735,-
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	5.000.000.-
6. Fsilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	3.479.000.-
7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp.	243.576.948,-
8. Pengadaan mebel	Rp.	5.000.000,-

9.	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp.	12.000.000,-
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp	14.999.185,-
11.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Rp.	35.966.666,-
12.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.	26.500.000,-

Tana Paser, 22 Oktober 2025

SEKRETARTIS ,

HATIMAH,S.Sos,M,Si

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN ,

HANIK YANUATI, SP

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Email: kesbangpol_paser@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hainun.A,SE
Jabatan : JF. Perencana Ahli Muda
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***
Nama : Hatimah,S.Sos,M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 22 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Sekretaris,	Jf. Perencana Ahli Muda,
Hatimah.S.Sos,M.Si	**Hainun.A,SE**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordaniasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen hasil Koordniasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen
3	Terlaksananya Koordaniasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen hasil Koordniasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen
4.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
5.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan
6.	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	270 Dokumen

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	106.538.922,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp.	39.602.400,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Rp.	18.224.500,-
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	30.084.600,-
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	6.267.555.604,-
6. Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	196.746.509.-

Tana Paser, 22 Oktober 2025

SEKRETARIS,

HATIMAH,S.Sos,M.Si

Jf. PERENCANAN AHLI MUDA,

HAINUN.A,SE

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Email: kesbangpol_paser@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hardiansyah S,Sos
Jabatan : JF. Analis KebiakanAhli Muda
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***
Nama : Hatimah ,S.Sos,M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi , Sosial,Budaya dan Agama
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 22 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Plt. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya dn Agama	Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda,
Hatimah.S.Sos,M.Si	**Hardiansyah,S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	3 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	25 Orang
3	Pembentukn Paskibraka	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembentukan Paskibraka	100 Orang
3.	Tersusunnya program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah dokumen program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	3 Dokumen
4.	Terlaksananya koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	120 Orang
5.	Terlaksananya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah .	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelapotran di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	4 Laporan

	SUB. KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangssan , Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	185.022.770,-
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangssan , Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	517.573.652,-
3.	Pembetukan Paskibraka	Rp.	2.732.064.011,-
4.	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Rp.	498.051.070,-
5.	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Rp.	725.939.700,-
6.	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Rp.	36.221.092,-

Tana Paser, 22 Oktober 2025

Plt. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya dn Agama ,

Hatimah.S.Sos,M.Si

Jf. ANALIS KEBJIAKAN AHLI MUDA,

HARDIANSYAH,S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Email: kesbangpol_paseryahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deri Fitriadi ,ST
Jabatan : JF. Analis Kebiakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***
Nama : Achmad Hartono,S,Sos,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 22 Oktover 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda,
Achmad Hartono,S,Sos,M.Si	**Deri Fitriadi,ST**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti koodinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	100 Orang
2	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	3 Laporan
3	Terlaksananya kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	300 Orang
4.	Terlaksananya koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	300 Orang
5.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	2 Laporan

SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
1. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Rp. . 2.196.881.542,-

2.	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Rp.	87.822.217,-
3.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Rp.	241.771.901.-
4.	Pelaksanaan Keoordinasi dibidang dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Rp.	64.591.739,-
5.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Rp,	50.091.739,-

Tana Paser, 22 Oktober 2025

Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

ACHMAD HARTONO,S.Sos,M.Si

Jf. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

DERI FITRIADI,ST

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Email: kesbangpol_paseryahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sudirman,S.Sos
Jabatan : JF. Analis Kebiakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***
Nama : Achmad Hartono,S,Sos,M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya di sebut ***Pihak Kedua.***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser,22 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik	Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda,
ACHMAD HARTONO,S.Sos,M.Si	**SUDRIMAN ,S.Sos**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Kewapadaaan Nasional dan Penanganan Konflik	Terlaksamanya kegiatan peningkatan koordinasi dalam rangka penangan Konflik, deteksi dini, pengawasan orang Asing dan tenaga kerja asing serta penerbitan rekomendasi penelitian	2 Dokumen
2	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Kewapadaaan Nasional dan Penanganan Konflik	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi kegiaran FKDM di Kecamatan .	2 Dokumen
3	Meningkatnya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di daerah dalam penyelenggaraan Kewapadaaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah Pelaporan Hasil pengawasan ATHG di wilayah Kabupaten Paser .	20 Orang
4.	Meningkatnya kapasitas Penyusunan Program dalam penyelenggaraan Kewapadaaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program Kerja	20 Orang
5.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Kewapadaaan Nasional dan Penanganan Konflik .	Jumlah Bahan Perumusan Bahan Kebijakan	6 Laporan
6.	Meningkatnya Koordinasi Pimpinan Daerah, Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi serta jumlah laporan hasil rapat rapat koordinasi dan konsultasi FORKOPIMDA	2 Dokumen

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN
1. Penyusunan program kerja dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Itelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing,dn Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah	Rp.	25.237.884,-

2.	Penyusunan Bahan Perumusan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Itelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing,dn Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah	Rp. .	78.798.904,-
3.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Itelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing,dn Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah	Rp.	102.450.000,-
4.	Pelaksanaan koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Itelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing,dn Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah	Rp.	403.285.000,-
5.	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Itelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing,dn Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah	Rp.	225.000.000.-
6.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Rp.	1.253.836.940,-

Tana Paser, 22 Oktober 2025

Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik

ACHMAD HARTONO,S.Sos,M.Si

Jf. ANALIS KEBJIAKAN AHLI MUDA,

SUDRIMAN ,S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 2

TANA PASER

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

NOMOR : 800/ 18 /BKBP-UM/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SEKERTARIAT, BIDANG DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/PPPK/PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang :

1. bahwa sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas, maka dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Sekertariat, bidang dan Pegawai Negri Sipil/PPPK/ Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Paser;
2. bahwa pemberian penghargaan kepada Pegawai Negri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap sebagaimana point a bertujuan untuk memberikan motivasi kepada Sekertariat, bidang dan Pegawai Negeri Sipil/PPPK/ Pegawai Tidak Tetap untuk meningkatkan kinerja dan Intregitas sebagai PNS/PPPK/PTT;
3. bahwa pemberian penghargaan kepada PNS/PPPK/PTT dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Sekertarian , bidang dan Pegawai Negeri Sipil/PPPK/ Pegawai Tidak Tetap dengan Kategori penghargaan sebagaimana Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penghargaan diberikan kepada Sekertariat , bidang dan Pegawai Negeri Sipil/PPPK/ Pegawai Tidak Tetap yang berkinerja dan intergirtas yang telah diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, berdasarkan hasil penilaian kinerja, penilaian kehadiran dan pengamatan langsung kepada yang bersangkutan;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2025

KEPALA BADAN,

Nonding,S.Sos.M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710607 199703 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
2. BKPSDM Kab. Paser di Tana Paser
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran Suat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor : 800/ /BKBP-UM/2025
Tanggal, 30 Desember 2025

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN DAN KATEGORI PENGHARGAAN
DILINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor	Nama/Pangkat/NIP	Jabatan	Kategori Penghargaan
1	Achmad Hartono, S.Sos, M.Si Pembina / IV a Nip. 19701012 199803 1 008	Kepala Bid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Capaian Realisasi Keuangan Tahun anggaran 2025 : Program Pendidikan Partai Politik 99,95 % Program Ormas 99,19 %
2	Hj. Hatimah, S.Sos. M.Si Pembina TK I / IV b Nip. '19681224 199002 2 001	Sekretaris	Capaian Realisasi Keuangan Tahun anggaran 2025 : Perencanaan 87,38 % Keuangan 86,46 % Umum 96,91 %
3	Hj. Hatimah, S.Sos. M.Si Pembina TK I / IV b Nip. '19681224 199002 2 001	Plt. Kabid Wasbang	Capaian Realisasi Keuangan Tahun anggaran 2025 : Program Penguatan Ideologi 94,63 % Program Ketahanan Ekonomi 65,36 %
4	Achmad Hartono, S.Sos, M.Si Pembina / IV a Nip. 19701012 199803 1 008	Plt, Kabid Wasnas	Capaian Realisasi Keuangan Tahun anggaran 2025 : Program Kewaspadaan Nasional 74,40 %
1	Hanik Yanuati,SP Penata Tingkat I/III.d Nip. 19690111 199308 2 005	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kepemimpinan : Khusus bagi Jabatan Struktural,kemampuan memimpin dan memotivasi.

Nomor	Nama/Pangkat/NIP	Jabatan	Kategori Penghargaan
1.	Setio Jatmiko, S.E Penata / III c Nip.19800315 200901 1 003	Penelaah Tekhnis Kebijakan Pada Bidang I	Oreintasi Pelayanan : Responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan
2.	Wahyu Rita, S.E Penata / III c Nip.19750102 200012 2 004	Penelaah Tekhnis Kebijakan Pada Bidang I	
3.	Syarkiah, SE Penata Muda / III a Nip.19780724 200701 2 012	Penelaah Tekhnis Kebijakan Pada Sekretariat	
4.	Arbain DH, SE PPPK / IX Nip.19810413 202421 1 007	Perencana Ahli Pertama	
1.	Umi Rokhmatullaili S. S.Tr.Keb PPPK / IX Nip. 19920307 202521 2 022	Penelaah Tekhnis Kebijakan Pada Bidang I	Komitmen : Loyalitas dan kesungguhan dalam menjalankan Tugas
1.	Julianty Siahaan. S.Ak Penata Muda / III a Nip. 19950801 202504 2 003	Perencana Ahli Pertama	Disiplin : Kepatuhan pada Aturan dan Jam Kerja
1	Hj. Hainun. A. S,E Penata TK I / III d Nip. '19760712 199603 2 004	JF Perencana Muda	Selalu semangat
2	Mahyudin Penata Muda / III a Nip. 19761030 200701 1 011	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sekretariat	Selalu semangat

Nomor	Nama/Pangkat/NIP	Jabatan	Kategori Penghargaan
1.	Sri Wahdaningsih, SE Penata Muda TK I / III b Nip. 19830714 200701 2 006	Penelaah Tekhnis Kebijakan Pada Sekretariat	Kerjasama : Kemampuan berkolaborasi dengan rekan kerja
2.	Nor Wahidah, SE Penata Muda / III a Nip. 19811222 200701 2 006	Penelaah Tekhnis Kebijakan Pada Sekretariat	
3.	Abdul Rahman. S.IP Penata Muda / III a Nip 19760126 200901 1 002	Penelaah Tekhnis Kebijakan Pada Bidang I	
4.	Ahmad Hamidy, A.Md PPPK / VII Nip. 19880508 202521 1 008	Pengelola Layanan Operasional Pada Bidang II	
5.	Ahmad Sahid, S.IP PPPK / IX Nip. 19950529 202521 1 011	Penata Layanan Oprasional Pada Bidang II	
6.	Rizkiyah, SE PPPK / IX Nip. 19890416 202521 2 009	Penata Layanan Oprasional Pada Bidang II	

KEPALA BADAN

Nonding,S.Sos.M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

HANIK YANUATI,SP

Atas Kepemimpinan : Khusus bagi Jabatan Struktural,kemampuan memimpin dan memotivasi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

Julianty Siahaan. S.Ak

Atas Disiplin : Kepatuhan pada Aturan dan Jam Kerjapada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

Umi Rokhmatullaili S. S.Tr.Keb

Atas Komitmen : Loyalitas dan kesungguhan dalam menjalankan Tugaspada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

SETIO JATMIKO,SE

Atas Oreintasi Pelayanan : Responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

Arbain DH, SE

Atas Oreintasi Pelayanan : Responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

WAHYU RITA, SE

Atas Oreintasi Pelayanan : Responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

SYARKIAH,SE

Atas Oreintasi Pelayanan : Responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

Sri Wahdaningsih, SE

Atas Kerjasama : Kemampuan berkolaborasi dengan rekan kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

Nor Wahidah, SE

Atas Kerjasama : Kemampuan berkolaborasi dengan rekan kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

Abdul Rahman. S.IP

Atas Kerjasama : Kemampuan berkolaborasi dengan rekan kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

Ahmad Hamidy, A.Md

Atas Kerjasama : Kemampuan berkolaborasi dengan rekan kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

Ahmad Sahid, S.IP

Atas Kerjasama : Kemampuan berkolaborasi dengan rekan kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

Hj. Hainun. A. S,E

Atas Selalu semangat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

Achmad Hartono, S.Sos, M.Si

Atas

Capaian Realisasi Keuangan Tahun anggaran 2025 : Yang Mencapai Program Pendidikan Partai Politik 99,95, Program Ormas 99,19 % % pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Kepada :

Mahyudin

Atas

Selalu semangat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Tana Paser, 30 Desember 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

NONDING, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710607 199703 1 007

Formulir E.61
Evaluasi Terhadap Hasil Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Paser
Periode Pelaksanaan : 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPJPD. 2022-2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Kondisi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renja s Perangkat Daerah s/d bulan 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										8		9		10		11		12		13 = 9 + 11		14 = 13 / 6 x 100%		15
1	2	3	4	5		6		7																
				Kab Evaluasi SAKIP dan APIP			80.806.251.686,00	80	16.676.514.436,00															
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	80	30.289.441.880,00	100%	7.804.778.750,00	100%	7.272.294.514,00	25,75	1.872.486.627,00	14,87	1.077.950.894,00	26,05	1.884.867.427,00	20,46	1.460.279.800,00	87,12	6.353.353.698,00	88,12	24.165.124.388,00	1,10	3,47	
		Koordinasi, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80	216.378.904,80	100%	165.484.688,00	100%	104.489.432,00	36,00	68.697.908,00	0,00	9.774.000,00	6,19	12.041.650	41,18	80.626.130	87,38	169.993.448,00	88,18	332.788.126,00	1,77	1,54	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	25	72.794.419,00	5	55.065.000,00	5	106.538.932,00	1	34.988.408,00	0	1.800.000,00	1	32.041.400	1	42.809.039	3	91.648.843,00	6	146.744.843,00	0,57	2,22	
		Monitoring dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen RKA SKPD	1	-	1	48.248.880,00	2	38.650.400,00	1	20.908.800,00	0	254.800,00			1	3.118.794	2	33.282.794,00	3	81.579.474,00	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen DPA SKPD	-	-	-	-	7	18.224.900,00	0		1				1	15.980.872	3	15.980.872,00	7	34.205.772,00	-	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	25	148.879.186,20	1	59.200.000,00	4	30.984.900,00	2	14.161.600,00	0	745.000,00			2	15.526.487	4	29.412.087,00	9	88.612.087,00	0,56	2,43	
		Administrasi Keuangan Perangkat	Terselenggaranya Administrasi	100%	27.811.003.805,00	97%	6.348.136.384,00	97%	6.484.382.113,00	25,94	1.616.648.777,00	15,48	1.015.753.388	25,73	1.663.167.386	15,01	1.226.398.988	86,46	5.522.368.464,00	87,43	11.958.524.466,00	87,4	0,43	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	25.948.382.358,00	75	5.925.184.416,00	80	6.167.165.804,00		1.663.120.841,00		1.005.788.468		1.624.262.915	96	1.201.884.314	96	5.301.568.538,00	81	11.332.753.848,00	0,95	0,44	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	175	1.862.621.545,00	250	424.951.972,20	270	316.216.309,00	100	153.648.936,00	80	51.984.906	70	39.204.660	93	28.434.664	279	193.422.916,00	520	668.773.516,00	0,41	0,33	
		Administrasi Umum Perangkat	Terselenggaranya Admin Umum Lancar	100%	1.847.680.751,00	99%	1.210.806.920,00	99%	519.072.150,00	23,12	120.531.450,00	6,74	34.979.000	34,87	180.991.400	32,08	166.506.276	96,81	502.527.842,00	97,87	1.713.333.992,00	97,8	1,04	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	1.880.853,00	1	700.000,00	1	2.304.481,00	0		0				1	2.303.000	1	2.303.000,00	2	3.003.000,00	0,40	1,87	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	25	121.156.276,70	2	473.817.490,00	2	180.114.996,00	1	38.980.000,00	0		2	139.424.906		12.478.000	2	175.383.906,00	4	648.875.390,00	0,40	0,37	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15	731.788.864,00	2	46.299.200,00	2	50.100.000,00	1	11.191.875,00	0	11.209.500			1	1.967.000	3	24.368.375,00	3	96.139.219,00	0,20	0,46	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	40	26.604.361,00	12	4.250.000,00	1	5.000.000,00	0		0		1	2.700.000			1	2.700.000,00	13	7.807.000,00	0,32	0,30	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	30.000.000,00			4	3.479.000,00	1		1		1		1	3.379.000	4	3.379.000,00	4	3.379.000,00	0,13	0,11	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600	1.200.000.000,00	176	468.166.670,00	4	241.979.946,00	1	32.207.972,00		23.770.486		57.633.681	1	127.597.193	4	241.199.276,70	134	709.366.946,70	0,21	0,06	
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Terealisasinya Barang Aset	12	97.664.000,00	100%	32.013.150,00	100%	5.000.000,00	13,40	670.000,00					84,20	4.210.000	97,60	4.880.000,00	98,60	36.893.150,00	8,2	0,38	
		Pengadaan Mobil	Jumlah Mobil Mobil yang	12	97.664.000,00	2	32.013.150,00	1	5.000.000,00	0	670.000,00	0				1	4.210.000	1	4.880.000,00	2	36.893.150,00	0,35	0,38	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Terlaksana Penyediaan Jasa	100%	342.384.812,60	100%	34.660.000,00	100%	36.996.165,00	34,87	8.648.740,00	10,86	2.951.728	10,46	3.630.300	31,38	8.473.439	77,81	28.672.165,00	78,81	48.180.251,00	78,3	0,11	
		Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	12.734.464,00	12	7.426.800,00	4	12.000.000,00	1	3.786.972,00					3,00	5.676.206	4	9.463.000,00	16	16.889.800,00	0,27	0,14	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terfasilitasi	60	324.317.303,00	4	17.234.256,00	12	14.994.184,00	3	2.661.747,00	1	2.931.795		7.820.309	1	2.801.425	4	11.413.184,00	8	28.648.441,00	0,19	0,09	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terealisasinya Barang Milik Daerah	100%	104.891.931,80	100%	45.319.306,00	100%	42.466.466,00			16,63	10.515.000	16,39	15.226.700	3,11	1.939.700	76,13	47.681.466,00	77,13	93.000.466,00	77,3	0,85	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda empat atau lebih, alat berat yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	13.249.812,80	3	3.192.000,00	3	35.966.466,00	0		0			34.836.766	3	1.935.700	3	36.966.466,00	6	72.726.466,00	0,48	2,21	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	15	36.511.200,00	10	7.650.000,00	10	26.900.000,00	0			17.849.400		1.230.000	4,00		4	11.719.000,00	14	8.274.200,00	0,28	0,13	
		Program Penataan Lembaga Pemerintah dan Kinerja Kelembagaan	Presentase Penurunan Kinerja Birokrasi	100%	764.791.141,32	100%	4.640.224.215,00	100%	3.434.660.433,00	5,81	199.641.000,00	9,26	318.176.288	31,86	1.087.580.473	47,88	1.644.671.489	94,63	3.250.069.260,00	95,63	8.140.293.475,00	99,63	90,71	
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemberdayaan Kelembagaan Sistem Ketatalaksanaan	Terselenggaranya Penyusunan Teknis Kebijakan Lembaga Pemerintah Dan Kerjasama Kelembagaan	30	764.791.141,32	100%	4.640.224.215,00	100%	3.434.660.433,00	5,81	199.641.000,00	9,26	318.176.288	31,86	1.087.580.473	47,88	1.644.671.489	94,63	3.250.069.260,00	95,63	8.140.293.475,00	3,2	90,71	
		Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan di Bidang Kabupaten Pemalang, Bupati Negara, Kawasan Bangda Pemerintah Kabupaten, Bidang Tunggal Ika dan Teknik Kabupaten	Jumlah Kabupaten Teknis di Bidang Lembaga Pemerintah Kabupaten, Bidang Negara, Kawasan Bangda, Pemerintah Kabupaten, Bidang Tunggal Ika dan Teknik Kabupaten	10	251.900.803,82	2	40.000.000,00	3	185.222.170,00			1	30.733.805	1	33.985.350	1	94.496.525	3,00	151.190.070,00	3	291.145.070,00	0,50	0,83	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	Jumlah di bidang yang mengikuti	440	407.272.272,00	90	1.880.224.215,00	25	51.671.662,00			1,96	8.121.305	1,85	18.231.245	40	3.700.634	3,78	103.864.000,00	107	1.383.579.384,00	1,38	13,32	
		Pemberdayaan Pasilitasi						100	2.732.044.011,20	2	199.641.000,00		289.321.888	130	935.388.848		1.424.172.945	100,26	2.589.524.121,00	100	2.589.524.121,00	0,00	-	
	Meningkatnya Kesiapsiagaan Kabupaten Paser yang ditandai dari berkurangnya jumlah kasus dan dampaknya bahkan yang ditimbulkan		Presentase Penyelenggaraan Pemilu																					

		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%	4.277.156.495,25		33.991.031.553,00	100%	2.341.078.759,00	1,87	43.787.600,00	86,37	2.021.993.322	3,66	85.594.743	8,06	188.579.130	99,95	2.339.934.195,00	99,95	36.330.966.748,00	124,94	8,49	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksanakannya Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	25	4.277.156.495,25		33.991.031.553,00	100%	2.341.078.759,00	1,87	43.787.600,00	86,37	2.021.993.322	3,66	85.594.743	8,06	188.579.130	99,95	2.339.934.195,00	99,95	36.330.966.748,00	4,0	8,49	
		Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.	10	12.500.000,00	2	25.124.000,00	0															
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.	5	12.500.000,00	1	21.472.500,00	0															
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6650	253.550.339,00	2650	1.025.398.300,00	150	56.379.000,00		0	5.385.293	135	42.412.100		7.852.200	120,00	55.640.363,00	2.770	1.081.948.663,00	0,42	4,26	
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1631	3.893.336.744,00	400	32.351.244.353,00	100	2.199.881.542,00	0	26.047.400,00	0	2.013.677.940	65	31.945.842	40	129.118.630	126,30	2.199.789.813,00	505	34.552.034.166,00	0,31	3,90	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11	115.109.414,00	3	562.794.400,00	3	87.822.217,00	0	17.719.600,00	0	2.930.119		11.236.800	1	55.608.900	3,00	87.490.019,00	6	651.289.419,00	0,40	1,61	
	Pemutakhiran pemrosesan dan pemberdayaan ormas		Terdata Organisasi Kemasyarakatan																				
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang aktif	75%	643.825.476,00	100%	908.741.292,00	100%	314.455.375,00	2,90	10.346.000,00	1,01	3.606.019	35,06	124.973.414	60,21	214.625.269	99,19	353.550.702,00	100,19	1.262.291.994,00	133,58	1,96	
		Peningkatan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	25	643.825.476,00	100%	908.741.292,00	100%	314.455.375,00	2,90	10.346.000,00	1,01	3.606.019	35,06	124.973.414	60,21	214.625.269	99,19	353.550.702,00	100,19	1.262.291.994,00	4,0	1,96	
		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun.	8	7.500.000,00	2	18.890.392,00	0	-	-	-													
		Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun.	8	7.500.000,00	2	17.724.000,00	0	-															
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	890	196.287.300,00	200	242.472.300,00	200	241.771.901,00	0	10.346.000,00	0	884.960	117	64.792.500	172	164.666.466	289,00	240.689.926,00	489	483.167.229,00	0,55	2,46	
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	920	196.149.200,00	100	238.293.600,00	300	64.891.728,00	0	-	0	1.437.631	60	38.352.114	60	24.037.800	120,00	63.827.349,00	420	302.122.949,00	0,45	1,89	

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pembinaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pembinaan Ormas, Fasilitasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10	732.388.974,00	7	391.358.000,00	2	50.091.739,00	0	-	0	1.283.424	0	21.828.800	2	25.921.200	2,00	49.033.424,00	4	440.391.424,00	0,40	1,90	
	Mewujudkan ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama		Fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																							
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Presentase kebijakan bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100%	4.429.085.918,00	100%	295.000.000,00	100%	1.185.419.812,00	-	-	0,82	9.750.100	20,00	237.036.800	44,54	527.961.867	65,36	774.748.767,00	66,36	1.069.748.767,00	66,36	0,24	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan budaya yang dirumuskan	25	4.429.085.918,00	100%	295.000.000,00	100%	1.185.419.812,00	-	-	0,82	9.750.100	20,00	237.036.800	44,54	527.961.867	65,36	774.748.767,00	66,36	1.069.748.767,00	2,7	0,24	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayati Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayati Kepercayaan di Daerah	25	1.018.180.675,00	5	80.000.000,00	3	498.051.020,00	1	-	0	-	1	160.224.000	1	176.514.482	3,00	336.738.482,00	8	416.738.482,00	0,32	0,41	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayati Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayati Kepercayaan di Daerah	560	2.970.905.848,00	120	200.000.000,00	120	691.147.700,00	100	-	-	-	200	76.812.800	100	336.669.185	400,00	413.481.985,00	520	513.481.985,00	0,93	0,24	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayati Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayati Kepercayaan di Daerah	25	76.363.550,63	4	15.000.000,00	4	36.221.092,00	1	-	1	9.750.100	1		1	14.778.200	4,00	24.528.300,00	5	39.528.300,00	0,40	0,52	
	Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang aman dan damai		Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pasir																							
		Program Penegakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase kasus konflik sosial yang tertangani / terselesaikan	100%	8.304.752.783,69	100%	2.845.483.780,00	100%	2.088.606.726,00	4,71	98.279.023,00	0,98	20.419.860	38,27	799.390.494	32,44	635.746.118	74,40	1.553.836.495,00	75,40	4.399.319.275,00	75,40	0,53	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantauan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dirumuskan	30	8.304.752.783,69	100%	2.845.483.780,00	100%	2.088.606.726,00	4,71	98.279.023,00	0,98	20.419.860	38,27	799.390.494	32,44	635.746.118	74,40	1.553.836.495,00	75,40	4.399.319.275,00	2,51	0,53	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10	19.920.453,25	2	39.196.460,00	2	35.237.884,00	0	450.000,00	1	-		19.927.598	1	1.350.000	2,00	21.727.598,00	4	60.924.158,00	0,40	3,83	
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	26.235.093,75	2	154.996.460,00	2	78.798.904,00	0	-	1	-		43.681.867	1	28.951.018	2,00	72.632.885,00	4	227.229.145,00	2,00	8,66	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	23	1.048.840.625,00	23	195.063.840,00	20	102.450.000,00		27.052.762,00		16.516.860		12.831.198	20	20.371.200	25,00	76.452.018,00	43	271.515.879,00	1,87	0,26	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaskadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaskadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	636.362.921,88	12	915.125.000,00	20	403.285.000,00		1.350.000,00		1.350.000		204.227.968	20	169.611.200	20,00	376.539.168,00	12	991.664.168,00	2,67	1,56	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	122.204.592,00	4	441.510.000,00	5	225.000.000,00	1	-	2	2.553.000	2	93.963.911		71.233.475	5,00	167.750.086,00	9	909.260.086,00	2,25	4,99	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60	5.349.448.541,75	12	1.399.990.000,00	2	1.253.836.940,00	1	69.428.263,00	0	-		425.078.352		344.229.225	1,00	838.735.840,00	13	2.238.725.840,00	0,22	0,42	

Rata-rata capaian kinerja (%)																		87,58	14 807 692 017				22,48	
Predikat Kinerja																		Tinggi						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Kerja sama yang solid menyebabkan Kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang dijadwalkan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum adanya Kepastian Tahapan Pemilu sehingga Untuk Anggaran Pendampingan Pemilu belum dapat dilaksanakan Tepat Waktu
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan selanjutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya

Disusun
Tanah Grogot,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Paser

Rondiah, S.Sos, M.M
NIP. 19710607 199703 1 007

Dievaluasi
Tanah Grogot,
Kepala Bappeda/Litbang
Kab Paser

Rusdan Nor, SE, M.Si
NIP. 19770308 199803 1 004

RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Nilai Akip dan SAKIP	A					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN -TAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat	80%	✓	✓	✓	✓	
1.1	**Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	✓	✓			Tersusunnya Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Laporan	✓			✓	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Laporan	✓			✓	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	✓	✓		✓	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/Bln	✓	✓	✓	✓	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	270 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	✓	✓	✓	✓	Tersedianya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Lisrtik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket			✓		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	✓	✓			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket		✓	✓		Tersedianya Bahan Logistik kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandan yang disediakan	2 Paket		✓	✓		Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Perundang - undangan yang disediakan	1 Dokumen		✓			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Penyediaan barang Milik Daerah	100%	✓				Tersedianya barang Milik Daerah
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	✓				Tersedianya Mebel
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	✓	✓	✓	✓	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	4 Laporan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya penyediaan Jasa Surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	✓	✓	✓	✓	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Prensentase barang milik daerah yang terpelihara	100%		✓	✓	✓	Terpeliharanya Barang Milik Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	2 Unit			✓	✓	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit		✓	✓		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
II	Meningkatkan Pemahaman Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase kesadaran masyarakat akan pemahaman idiologi pancasila	100%					
1	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Presentase penurunar konflik yang berbau sara	100%	✓	✓	✓	✓	

1.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.**	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa Yang dirumuskan	6 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Tersedianya dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa Yang dirumuskan
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Dokumen		✓	✓	✓	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	100 Orang	✓	✓	✓	✓	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka
III	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang Responsifdan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	80%					
1.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	RATA - RATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU	80%	✓	✓	✓	✓	

1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokras , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala d\Daerah serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan	5 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Tersedianya dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	150 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
	Pelaksanaan Koordiniasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	100 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Koordiniasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	3 Laporan		✓	✓	✓	Terlaksananya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah

IV	Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	75%					
1.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Presentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang aktif	75%	✓	✓	✓	✓	
1.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi**	Jumlah Dokumen dalam melaksanakan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	5 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Tersediannya dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	200 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	300 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	2 Laporan		✓	✓		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah

V	Mewujudkan Ketahanan ekonomi sosial Budaya dan Agama	Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ekonomi , Sosial Budaya	100%					
1	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	Presentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi dan Budaya yang di tindak lanjuti	100%	✓	✓	✓	✓	
1.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan budaya yang dirumuskan	5 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Tersedianya dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan budaya yang dirumuskan
	Penyusunan Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi ,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Dokumen		✓	✓	✓	Tersusunnya Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi ,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

VI	Meningkatan Kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman	Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser						
1	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Presentase Kasus Konflik sosial yang tertangani / terselesaikan	100%	✓	✓	✓	✓	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasionaldan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social yang dirumuskan	100%	✓	✓	✓	✓	Tersedianya dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social yang dirumuskan
	Penyusunan Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen		✓	✓		Tersusunnya Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen		✓	✓		Tersusunnya kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evalausi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasalitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evalausi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasalitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Monitoring, Evalausi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasalitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	2 Dokumen		✓	✓		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

Tana Paser, 17 Januari 2025

Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Paser

NONDING, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	Nomor SOP	86/BKBP-PK/2025
	Tanggal Pembuatan	09 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	10 Januari 2025
	Disahkan oleh	Kepala Badan PEMERINTAH KABUPATEN PASER – BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK **NONDING,S.Sos, M.M** **NIP.19710607199703 1007**
Sekretariat	**Nama SOP**	**Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser - Peratuan Bupati paser Nomor 28 Tanun 2023 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser	1. Mampu menggunakan Komputer/notebook 2. Mampu mengolah dan menganalisis data 3. Mampu menyusun indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan 4. Mampu Mengevaluasi Kinerja Program dan kegiatan
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
	1. Laporan Kegiatan 2. DPA 3. Penetapan Kinerja (TAPKIN) 4. ATK 5. Komputer/Notebook/Printer 6. Meja /Kursi Kerja
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1 Keterlambatan penyusunan LKjIP PD menghambat penyusunan LKjIP Kabupaten	

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA				Mutu Baku			Ket.
		Penyusun bahan laporan	JF.PerencanaAhli Muda	Sekretaris	Kepala Badan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi Kepala untuk penyusunan LKjIP					Surat Edaran Sekda	5 menit	Surat Edaran yang telah didisposisi	
2	Menghimpun laporan kegiatan dari bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan LKjIP					Surat Edaran yang telah didisposisi	120 menit	Informasi ke PPTK	
3	Menerima, laporan kegiatan dari bidang-bidang dan sekretariat serta mengolah data					Informasi ke Bidang	2 hari	Laporan Kegiatan	
4	Memverifikasi, dan menganalisis data (menyusun draf LKjIP)			Koreksi		Laporan Kegiatan	14 hari	Draf LAKIP	
5	Konsultasi dan menyampaikan draf LKjIP					Draf LAKIP	120 menit	Draf LAKIP	
6	Menyusun Draf akhir LKjIP dan memberi paraf					Draf LAKIP	1 hari	Draf LAKIP	
7	Meneliti dan memaraf					Draf LAKIP	120 menit	Draf LAKIP yang sudah diparaf	
8	Menandatangani LKjIP					Draf LAKIP yang sudah diparaf	30 menit	LAKIP yang telah ditandatangani	
9	Menyerahkan LKjIP					Draf LAKIP yang sudah diparaf	3 menit	LAKIP yang telah ditandatangani	
10	Menerima LKjIP yang sudah ditandatangani Kepala , digandakan, diarsip dan dikirimkan ke instansi terkait					LAKIP yang telah ditandatangani	180 menit	LAKIP telah digandakan dan siap dikirim ke instansi terkait	

PEMERINTAH KABUPATEN PASER **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	Nomor SOP	: 084 / BJBP-PK / I /2025
	Tanggal Pembuatan	: 08 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 09 Januari 2025
	Disahkan oleh	Kepala Badan PEMERINTAH KABUPATEN PASER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nanding,S.Sos, MM NIP. 19710607 199703 1007
Sekretariat	Nama SOP	**: Pengumpulan Data Kinerja**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kimnerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja. 3. Peraturan Bupari Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang kedudukan, Sususnan Organisasi, Tiugas dab Fungsi, Serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .	1. Memiliki Kemampuan Pengolah data Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
Keterkaitan SOP	**Peralatan/ Perlengkapan**
1. SOP Surat Keluar 2. SOP Pembuatan Pelaksanaan Kegiatan 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja	1. Komputer dan Kelengkapan 2. ATK
Peringatan	**Pencatatan & Pendataan**
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapai kinerja sesuai target yang di tetapkan	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

II. DOKUMENTASI DASAR SOP

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Seretaris Dinas	Kepala Bidang	Perencana Ahli Muda	Jabatan Fungsional	Sraf Penyusun Eavaluasi Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Data Laporan Kinerja Triwulan Kepada Subbag/seksi,OPD dan Instansi terkait						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi	15 menit	Disposisi	SOP Alur surat Masuk dan surat Keluar
2	Merekap laporan kinerja Triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Kinerja Aksi	30 menit	Lembar Disposisi	Terkait SOP Pengumpulan Data Kinerja
3	Mengolah Data Laporan Kinerja Triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, laporan Progres Bulanan	5 menit	Draf laporan Kinerja	
4	Menyusun Laporan Kinerja Triwulan						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draf Laporan Kinerja	30 menit	Draf Laporan kinerja	
5	Mensosialisasikan Laporan Kinerja triwulan kepada Pejabat Terkait						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draf laporan kinerja	30 menit	Draf Laporan kinerja	
6	Merekap 2 (Dua) laporan triwulan untuk menyusun Laporan						Catatan Pembagian Tugas	2 Hari	Disposisi	
7	Menyusun Laporan Semester dan Laporam Tahunan		Ya		Tidak		data Laporan Kinerja Triwulan	120 hari	Lembar Disposisi	
8	Mensosialisasikan Laporan Semesteran		Tidak				Hasil Koreksi Laporan kinerja Triwulan	60 menit	Draf Laporan kinerja	
9	Menyusun 2 (Dua) laporan semesteran menjadi laporan kinerja tahunan	Ya					Laporan kinerja Triwulan	15 menit	Draf Laporan kinerja	
10	Selesai									

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Tanah Grogot, Kabupaten Paser
Kode Pos 76211, *Email : kesbangpol_paser@yahoo.com*

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

NOMOR : 052 /76 /BKBP-PK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan pembentukan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022,.

Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomer 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Tahun 2025 dengan semua keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusun Laporan Kinerja;
b. Menyusun dokumen perencanaan strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Cascading (pohon kinerja), Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Melaksanakan pengukuran dan penyusunan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
d. Mengkoordinasikan dan mengkomfirmasikan hasil Penyusunan Laporan kinerja.
e. Mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Melaporkan dan menyampaikan dokumen hasil Penyusunan Laporan Kinerja kepada Kepala Badan.

KETIGA : Rincian tugas Tim dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II;

KEEMPAT : Lampiran keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Ketiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 3 Mei 2025

KEPALA BADAN



NONDING, S, Sos, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19710607 199703 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser di Tana Paser
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser di Tana Paser
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor : 052/ 76 /BKBP-PK/2025
Tanggal : 3 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER TAHUN 2022

Penanggung Jawab : Kepala Badan
Ketua : Sekretaris
Sekretaris : JF. Perencana Muda
Anggota :

1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama
3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik
4. Kasub bag. Umum dan Kepegawaian
5. JF Analis Kebijakan Ahli Muda
6. JF. Perencana Ahli Pertama
7. Pelaksana masing masing Bidang

KEPALA BADAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NONDING, S, Sos, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19710607 199703 1 007